



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**No. 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2006–2025**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
I.1 LATAR BELAKANG-----	1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN-----	2
I.3 LANDASAN HUKUM -----	2
I.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN -----	3
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN-----	3
BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH-----	4
II.1 KONDISI DAN ANALISIS -----	4
A. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup-----	4
B. Demografi -----	6
C. Ekonomi dan Sumber Daya Alam -----	7
D. Sosial Budaya dan Politik-----	16
E. Prasarana dan Sarana-----	27
F. Pemerintahan -----	30
G. Wilayah dan Tata Ruang-----	32
II.2 PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH -----	34
BAB III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH -----	36
III.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT -----	36
III.2 VISI-----	36
III.3 MISI -----	36
III.4 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH -----	38
A. ARAHAN UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG-----	38
A.1. Agenda Mewujudkan Masyarakat Maju dan Sumber Daya Manusia Berkualitas -----	38
A.2. Agenda Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Pemanfaatan Sumber Daya -----	42
A.3. Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal yang Berkembang dan Tata Pemerintahan Yang Baik -----	51
A.4. Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan-----	54
B. PERAN SUB-WILAYAH PEMBANGUNAN -----	59
BAB IV. PENUTUP -----	60

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I.1 LATAR BELAKANG

Selama periode lima tahun terakhir, pembangunan Kabupaten Rejang Lebong didasarkan atas Visi “Terwujudnya kemampuan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan atas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepada kepribadian yang mulia menuju masyarakat sosial yang mandiri”. Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten di atas merupakan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang telah dijadikan inspirasi dari setiap kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah sebelumnya telah mengacu kepada Visi Pembangunan Kabupaten setelah terlebih dahulu diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten.

Visi pembangunan di atas telah diterjemahkan ke dalam lima Misi pembangunan sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh usaha kecil menengah dan koperasi yang mandiri dengan berbasiskan agribisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan kabupaten yang demokratis, bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan. Kelima Misi tersebut diarahkan pada empat isu strategis, yaitu ekonomi, pemberdayaan masyarakat, politik dan pemerintahan, dan hukum. Di bidang ekonomi, strategi yang telah dilakukan adalah perluasan pasar, mengembangkan komoditas unggulan, dan melakukan diversifikasi produk dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas. Di bidang pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi di bidang politik dan pemerintahan diarahkan pada pembenahan infrastruktur politik, pendidikan politik, serta pembenahan lembaga keagamaan dan adat sebagai pengontrol proses pembangunan. Di bidang hukum, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan mutu dan implementasi Peraturan Daerah, kemandirian lembaga peradilan dan penegakan hukum, peningkatan penegakan hukum dan HAM, dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Sebagian dari isu-isu strategis di atas tetap akan mendominasi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama dua puluh tahun ke depan. Pembangunan jangka panjang ke depan hendaknya berbasis kawasan dimana sektor-sektor terkait diharapkan memberikan dukungan secara terpadu tanpa harus memperhatikan sektor mana yang menjadi unggulan. Peran serta masyarakat harus ditingkatkan dengan memposisikan mereka sebagai subjek pembangunan.

Otonomi daerah hendaknya dilaksanakan dalam empat koridor pembangunan. Pertama, otonomi daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat. Kedua, sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya harus jelas dan aplikatif sehingga benar-benar dapat menjadi pedoman yang memudahkan praktek pelaksanaan di lapangan. Ketiga, otonomi daerah dalam jangka panjang harus mampu mewujudkan ketahanan daerah dalam berbagai aspek pembangunan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Keempat, bahwa ketiga hal diatas dilaksanakan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus mampu memantapkan demokrasi dalam semangat persatuan dan kesatuan nasional.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa peraturan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan era otonomi daerah. Salah satu konsekuensi dari amandemen tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Dokumen RPJPD Kabupaten hendaknya menjadi komitmen bersama elemen-elemen pelaku pembangunan daerah sehingga dijadikan rujukan dalam menyusun perencanaan ke depan.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sasaran dari penetapan RPJP Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu komponen pelaku pembangunan dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

## **I.3 LANDASAN HUKUM**

Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Rejang Lebong adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong juga dilandaskan atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, tambahan pada Lembaran Negara Nomor 2828).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di dalam Provinsi Bengkulu.

#### **I.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Bengkulu yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen perencanaan tersebut mencakup visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Rejang Lebong untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu 2006 – 2026. Selanjutnya dokumen tersebut harus dijabarkan lebih detail setiap lima tahun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### **I.5 TATA URUT**

Penulisan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab III. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Bab IV. Penutup

# **BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**

---

## **2.1. KONDISI DAN ANALISIS**

Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan kemajuan di berbagai kehidupan masyarakat seperti sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, infrastruktur, sistem demokrasi, hukum, keamanan dan pemerintahan, wilayah dan tata ruang, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih juga terdapat berbagai tantangan yang harus dipecahkan dan perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan 20 tahun ke depan.

### **A. Geomorfologi dan Lingkungan**

#### **Input:**

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran memiliki luas 151.576 ha, berada pada koordinat 102° 19' – 102° 57' Bujur Timur dan 2° 22' – 3° 31' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah ini (74,33%) terletak pada ketinggian 100 – 1.000 m di atas permukaan laut dan sisanya terletak pada ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut (24,18%) dan kurang dari 100 m di atas permukaan laut (1,49%). Dengan suhu udara antara 20 – 30 °C dan curah hujan di atas 2.000 mm per tahun, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki kekhasan wilayah dibandingkan wilayah-wilayah lain di Provinsi Bengkulu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada kemiringan lahan antara 2 – 40% (67,97%), sedangkan sisanya terletak pada kemiringan lahan di atas 40% (25,02%) dan kurang dari 2% (7,01%). Jenis tanah yang ada terdiri dari Andosol yang menempati lahan seluas 108.570 ha (26,42%), Latosol seluas 43.000 ha (10,46%), Regosol seluas 15.600 ha (3,80%), Aluvial seluas 10.000 ha (2,43%), Podsolik Merah Kuning/Latosol/Andosol seluas 52.000 ha (12,65%), Komplek Podsolik Merah Kuning dan Latosol seluas 34.400 ha (8,37%), dan Komplek Podsolik Coklat dan Latosol seluas 147.410 ha (35,87%).

Pada tahun 2004 di Kabupaten Rejang Lebong terdapat lahan yang berpotensi untuk diusahakan adalah seluas 49.736 ha, sedangkan lahan yang sementara tidak diusahakan adalah seluas 270 ha. Potensi lahan yang telah diusahakan untuk tanaman pangan tersebar secara merata di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran. Sebaliknya, hampir semua lahan yang tidak diusahakan terdapat di Kecamatan Kota Padang (211 ha) dan Kecamatan Padang Ulak Tanding (57 ha), sedangkan sisanya terdapat di Kecamatan Selupu Rejang (2 ha).

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2004 sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi tersebut disebabkan karena adanya proses penegakan hukum yang semakin baik serta adanya kontrol oleh masyarakat yang peduli terhadap masalah lingkungan. Kontrol masyarakat terhadap manajemen lingkungan tersebut pada umumnya dilakukan melalui pemberian informasi tentang perubahan kualitas lingkungan, baik secara langsung kepada pemerintah maupun melalui publikasi di media masa. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan cermin dari pergeseran status masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

### **Analisis:**

Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong bertumpu pada sektor pertanian yang didukung oleh lahan budidaya yang subur dan iklim yang sesuai untuk pengembangan komoditi dataran tinggi. Produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong adalah yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Bengkulu. Modal dasar ini sangat penting mengingat komoditi pertanian dataran tinggi memiliki daya saing tinggi karena hanya dapat dikembangkan di sebagian kecil wilayah regional di Pulau Sumatera. Jenis komoditi unggulan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan adalah komoditi hortikulura terutama sayur-sayuran dataran tinggi.

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong memiliki letak yang strategis karena memiliki akses yang cepat menuju Jalan Lintas Sumatera. Hal ini memudahkan transportasi dan pemasaran produk menuju pusat-pusat pertumbuhan di luar Provinsi Bengkulu seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Peluang ini dapat dimanfaatkan secara efektif melalui sistem pembangunan berorientasi regional, misalnya melalui jaringan kerjasama saling menguntungkan dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki kekhasan sumber daya serupa.

Sebagai daerah yang sebagian besar bergelombang dan berbukit-bukit, wilayah Kabupaten Rejang Lebong rawan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kondisi seperti ini memerlukan sistem perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukungnya. Kelestarian lingkungan merupakan modal utama dalam melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang di Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber daya hutan yang terletak di hulu daerah aliran sungai (DAS), seperti DAS Musi, juga rentan terhadap eksploitasi secara berlebihan seperti penebangan liar (*illegal logging*). Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan berdampak secara in-situ pada kualitas sumber daya alam tersebut, dan secara eks-situ pada kawasan di sekitarnya seperti terganggunya kuantitas dan kualitas aliran sungai. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selama 20 tahun mendatang harus mampu menselaraskan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.



### **Output:**

Keberhasilan pembangunan yang berhubungan dengan geomorfologi dan lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong selama 20 tahun ke depan akan menghasilkan target capaian sebagai berikut:

1. Produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong lebih tinggi dibandingkan produktivitas lahan pertanian di wilayah-wilayah lain di Provinsi Bengkulu.
2. Produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Rejang Lebong memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan produk-produk dari daerah lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Bengkulu.
3. Mengingat letak geografis yang sangat strategis, Kabupaten Rejang Lebong akan berkembang menjadi pusat pemasaran produk-produk unggulan dataran tinggi, baik yang dihasilkan oleh Kabupaten Rejang Lebong sendiri maupun oleh daerah-daerah lain.
4. Kawasan tangkapan air (*catchment area*) yang berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong akan tetap terjaga, debit air sungai relatif stabil antara musim hujan dan musim kemarau, tingkat kejernihan air sungai juga tetap terjaga di sepanjang tahun.

## **B. Demografi**

### **Input:**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas, berhubungan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong di masa mendatang. Kualitas kehidupan masyarakat dapat dinilai dari aspek jumlah dan komposisi penduduk, aspek kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas lingkungan dan moral, serta aspek kesejahteraan.

Di bidang kependudukan, jumlah penduduk terus meningkat meskipun telah dilakukan upaya pengendalian. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada periode 1999 – 2003 adalah sebesar 1,26% per tahun. Jumlah penduduk di enam kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong pasca pemekaran (yakni Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, Selupu Rejang, Bermani Ulu dan Curup) pada tahun 2000 sampai 2003 masing-masing adalah 226.753, 238.425, 238.498 dan 241.093 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Curup, yakni 113.014 jiwa pada tahun 2003, sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Kota Padang, yakni 19.064 jiwa pada tahun yang sama.

Upaya pembangunan kependudukan dan keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat terus mengalami kemajuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita dan jumlah UPPKS yang melakukan usaha

ekonomi produktif terus meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui penyediaan asuransi Kartu Tanda Penduduk, dan pembagian Kartu ASKES keluarga miskin dan pembagian beras keluarga miskin. Jumlah perempuan di birokrasi semakin meningkat, akses perempuan terhadap layanan kesehatan semakin membaik, serta pendidikan dan keterlibatan dalam kegiatan publik juga sudah semakin meluas.

### **Analisis:**

Tantangan utama di bidang sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang adalah masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor yang berperan dalam kemiskinan penduduk adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin, kurangnya ketersediaan data, kurangnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat miskin, lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Pengentasan kemiskinan dapat diatasi melalui peningkatan kualitas SDM yang cerdas teori, terampil berkarya dan religius. Sumber daya manusia yang demikian dapat memenuhi kriteria dunia kerja seperti yang diinginkan stakeholder seperti industri. Selain itu, penduduk Kabupaten Rejang Lebong dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha-usaha produktif sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran.

### **Output:**

Output pembangunan di bidang demografi adalah terwujudnya masyarakat maju dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Wujud masyarakat maju dan SDM berkualitas di Kabupaten Rejang Lebong dapat ditunjukkan oleh:

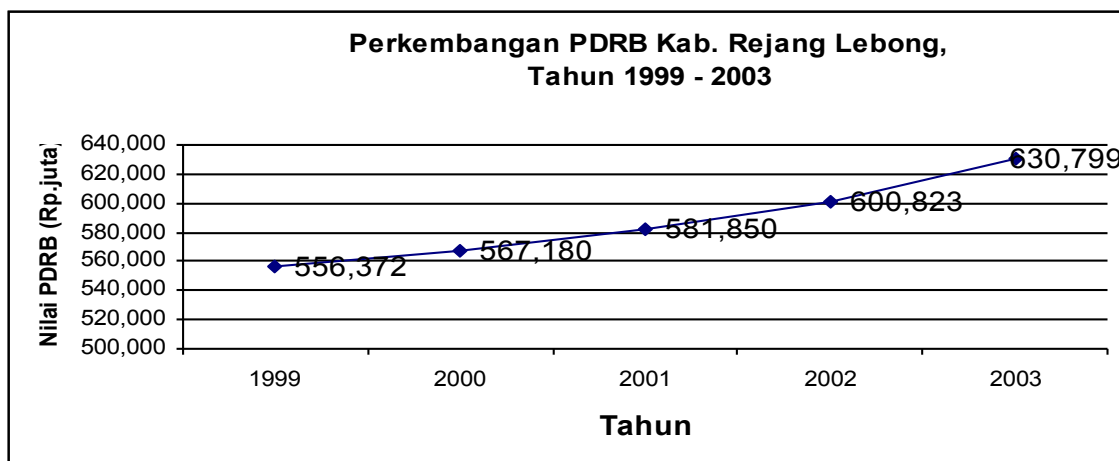
1. Terwujudnya masyarakat yang hidup dalam suasana penuh religius;
2. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan;
3. Mempunyai perilaku yang mengacu pada paradigma sehat sehingga terwujud Rejang Lebong sehat 2010.

## **C. Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

### **Input:**

Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu pemahaman terhadap karakteristik dan pola pertumbuhan PDRB akan dapat menjelaskan perkembangan ekonomi daerah. Sejak tahun 1999 sampai dengan

tahun 2003 PDRB Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan harga konstan cenderung mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 3.19 % per tahun. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 PDRB dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Perkembangan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong yang ditunjukkan oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 1,75% pada tahun 1999 menjadi 3,26% pada tahun 2002 dan 4,99% pada 2003. Nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari Rp. 556.374 juta pada tahun 1999 menjadi Rp. 600.823 juta pada 2002 dan Rp. 630.799 juta pada 2003. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari Rp. 1.309.972,- pada tahun 1999 menjadi Rp. 1.349.706,- pada 2002 dan Rp. 1.412.273,- pada 2003.

Rendahnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong memberikan gambaran belum pulihnya kondisi perekonomian daerah, terutama sektor yang dominan, seperti sektor pertanian hanya meningkat dari 264.798 juta pada tahun 2000 menjadi 270.891 juta pada tahun 2001 atau hanya meningkat 2,30%. Namun pada dua tahun terakhir peningkatan nilai tambah sektor pertanian meningkat cukup signifikan, yaitu 5,43 % tahun 2002 dan 7,68 % pada tahun 2003.

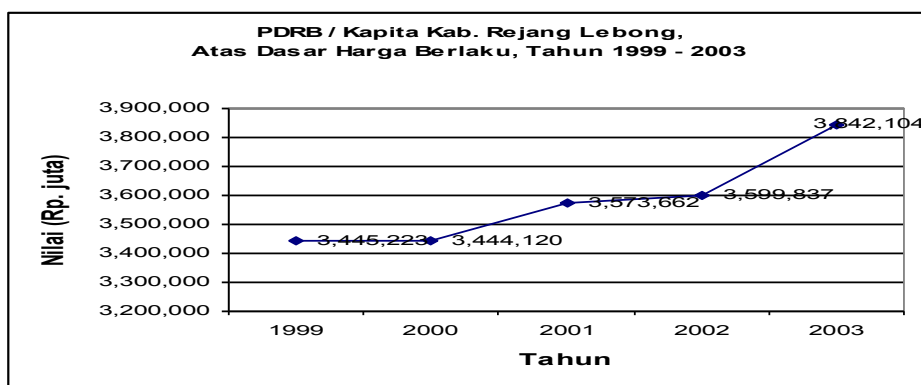
Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2003 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa 4,38%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,54% dan sektor pengangkutan dan komunikasi 3,21%. Namun sektor-sektor tersebut kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong rata-rata masih dibawah 10%, sehingga peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan relatif kecil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan perbedaan pertumbuhan antar sektor, namun sektor pertanian masih mendominasi dalam menyumbangkan nilai tambahnya terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai *leading sector* diantara sektor-sektor yang lainnya

Jika dilihat perkembangan PDRB Kabupaten Rejang Lebong atas harga berlaku, pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.715.093 juta, nilai ini meningkat sebesar 7,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Relatif rendahnya peningkatan ini disebabkan rendahnya kontribusi PDRB sektor pertanian yang berasal dari sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap total PDRB Kabupaten Rejang Lebong, karena kontribusinya lebih dari 50 %.

Struktur ekonomi regional Kabupaten Rejang Lebong ternyata masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun peranan sektor pertanian sedikit mengalami penurunan dari 58,85% pada tahun 2002 menjadi 58,05% pada tahun 2003. Diurutan kedua penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong adalah sektor jasa-jasa, yaitu 14,70%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 9,16% dan sektor pengangkutan dan komunikasi 6,24%. Turunnya kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh turunnya produksi di sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor kehutanan.

Untuk menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah atau daerah salah satu indikatornya adalah PDRB perkapita. Perkembangan PDRB / kapita Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar : 2,76 % / tahun. Pada tahun 1999 PDRB perkapita sebesar Rp. 3.445.223,- dan meningkat menjadi Rp. 3.842.104,- pada tahun 2003. Sementara itu PDRB perkapita Provinsi Bengkulu pada tahun yang sama telah mencapai Rp.4.174.263,-. Angka PDRB per kapita tersebut mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan atau kemakmuran rata-rata masyarakat Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah tingkat kemakmuran rata-rata provinsi. Kondisi tersebut patut di maklumi mengingat akibat dampak krisis ekonomi semua daerah termasuk Kabupaten Rejang Lebong mengalami kelesuan ekonomi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1999 - 2003 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Upaya percepatan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan dasar untuk kepentingan publik. Sebagai kabupaten induk dengan pemekaran dua kabupaten baru, sudah barang tentu sumber-sumber dana yang tersedia untuk kegiatan pembangunan mengalami penurunan

Sumber keuangan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2004 masih sangat tergantung kepada subsidi pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 118.964.000.000,- (75,23%), sementara itu sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah sendiri (PAD) masih sangat kecil (6,75 %), yaitu sebesar Rp.10.671.201.000,-.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,68% pada tahun 2003, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,38%, sektor perdagangan sebesar 3,54%, sektor pengangkutan dan komunikasi 3,21%, industri pengolahan 2,54%, sektor jasa-jasa 1,80%, sektor bangunan 1,10%, dan sektor listrik, gas dan air sebesar 0,79%. Semua sektor tersebut mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif terjadi pada sektor pertambangan, yakni -1,22% atau turun dari 1,49% pada tahun 2002, yang disebabkan oleh semakin menurunnya produktivitas pada subsektor penggalian.

Struktur ekonomi regional Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2003 mencapai 58,05% pada tahun 2003 atau turun dari 58,84% pada tahun 2002. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini sangat dipengaruhi peran dari subsektor-subsektor pertanian. Urutan berikutnya pada tahun 2003 adalah sektor jasa-jasa (15,15%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,16%), sektor pengangkutan dan komunikasi (6,24%), sektor bangunan (4,12%), sektor industri pengolahan (2,90%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,56%), sektor listrik, gas dan air bersih (1,5%), dan sektor pertambangan (0,31%).

Kontribusi subsektor-subsektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 1993 – 2003 yang paling dominan berasal dari tanaman bahan pangan dan tanaman perkebunan. Secara berurutan kontribusi lengkap dari subsektor-subsektor tersebut adalah sebagai berikut: tanaman bahan pangan Rp. 558.685 juta, tanaman perkebunan Rp. 345.215 juta, peternakan Rp. 55.358 juta, perikanan Rp. 32.661 juta dan kehutanan Rp. 4.309 juta.

Potensi komoditi pertanian unggulan Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh sayuran, perkebunan, perikanan dan peternakan. Potensi sayuran tertinggi terdapat di Kecamatan Selupu Rejang diikuti oleh Kecamatan Curup dan Sindang Kelingi, potensi perkebunan di Kecamatan Kecamatan Bermani Ulu, Sindang Kelingi dan Kota Padang, potensi perikanan di Kecamatan Curup, Bermani Ulu, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang, sedangkan potensi peternakan terdapat di Kecamatan Selupu Rejang dan Sindang Kelingi.

Produktivitas lahan pertanian tanaman pangan cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Rata-rata produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari 3,9 ton/ha pada tahun 2003 menjadi 4,3 ton/ha pada tahun 2004. Luas panen padi juga meningkat dari 12.962 menjadi 13.302 ha pada kurun waktu yang sama. Kecenderungan peningkatan produktivitas juga terjadi pada beberapa komoditi palawija, seperti jagung yang meningkat dari 1,95 menjadi 2,16 to/ha pipilan kering, dan kedelai dari 0,92

menjadi 1,68 ton/ha biji kering. Dua komoditi sayuran utama Kabupaten Rejang Lebong, yakni cabe dan tomat, mengalami kenaikan produktivitas masing-masing dari 17,90 dan 44,40 ton/ha pada tahun 2003 menjadi 52,00 dan 63,00 ton/ha pada tahun 2004.

Perkembangan subsektor jasa terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 1993 – 2003 yang paling dominan berasal dari administrasi pemerintahan sebesar Rp. 228.562 juta. Kontribusi PDRB berikutnya berasal dari subsektor swasta terutama perorangan dan rumah tangga sebesar Rp. 26.262 juta.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 1993 – 2003 didominasi oleh subsektor perdagangan dan eceran. Jumlah PDRB Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran yang diperoleh melalui subsektor tersebut adalah Rp. 57.381 juta, diikuti oleh subsektor restoran sebesar Rp. 13.834 juta dan subsektor perhotelan sebesar Rp. 317 juta. Kontribusi subsektor tersebut terhadap PDRB diharapkan meningkat dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Infrastruktur perekonomian Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2003 tersebar cukup merata di enam kecamatan. Jumlah bank adalah 10 unit yang tersebar di Kecamatan Curup (6 unit), Selupu Rejang (2 unit) dan Pada Ulak Tanding (2 unit). Koperasi berjumlah 136 buah yang sebagian besar terdapat di Kecamatan curup (109 buah), sedangkan unit pengelolaan keuangan desa (UPKD) berjumlah 51 unit dan pasar 12 buah yang tersebar merata di enam kecamatan.

Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk lahan budidaya adalah seluas 96.108,20 ha atau 63,41% dari luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Komposisi potensi lahan untuk kegiatan ekonomi daerah tersebut adalah lahan pertanian seluas 10.880,46 ha, hutan seluas 53.017,46 ha, perkebunan seluas 31.309,72 ha dan perikanan seluas 900,56 ha. Sisa lahan seluas 36,59% dari luas wilayah terdiri dari kawasan hutan lindung yang salah satu fungsinya adalah sebagai daerah tangkapan air terutama bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.

### **Analisis:**

Pada tahun 2025, nilai PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD Kabupaten Rejang Lebong, yakni meningkat lebih dari 10 % pada tahun 2006 menjadi di atas 30% pada tahun 2025. Nilai PDRB per kapita juga diharapkan meningkat sekitar enam kali lipat selama dua puluh tahun ke depan, yakni sekitar Rp. 3,84 juta pada tahun 2003 menjadi sekitar Rp. 21,9 juta pada tahun 2025.

Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju.

Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana persaingan ekonomi antar daerah/negara semakin ketat sebagai akibat semakin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan sektor pertanian dan ekspor bahan mentah serta eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Secara internal, tantangan yang dihadapi adalah penambahan penduduk yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai lebih dari sekitar 50 persen dari total penduduk pada periode sekitar 2020–2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka.

Tantangan internal penting lainnya adalah terlalu terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah tertentu. Ke depan, perekonomian dituntut untuk lebih mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh daerah dengan mendorong perkembangan ekonomi di daerah yang masih tertinggal. Di samping akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan pembangunan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi daerah sendiri untuk mewujudkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan sumber-sumber pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, tantangan pembangunan ke depan adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah sendiri, serta menjamin ketersediaan pelayanan kebutuhan dasar.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Permasalahan di sektor pertanian yang muncul di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikelompokkan berdasarkan subsektor-subsektor. Pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menghadapi permasalahan sebagai berikut: (i) terbatasnya ketersediaan lahan budidaya, (ii) terjadinya konversi lahan, (iii) terbatasnya sarana dan prasarana pertanian, (iv) terbatasnya modal usaha, (v) rendahnya penguasaan teknologi di tingkat petani, dan (vi) lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani. Secara khusus, subsektor peternakan memiliki keterbatasan dalam penyediaan bibit berkualitas dan pakan ternak, sedangkan subsektor perikanan, terutama perikanan tangkap, menghadapi kendala terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan. Hasil hutan alam semakin menurun sebagai akibat terjadinya penebangan hutan yang tidak terkontrol sementara hasil hutan tanaman dan hasil hutan non-kayu belum dimanfaatkan secara optimal.

Semua permasalahan di sektor pertanian di atas berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Lahan usaha yang sempit akibat rendahnya ketersediaan lahan budidaya dan terjadinya konversi lahan berdampak pada rendahnya pendapatan petani sehingga tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian serta minimnya akses petani terhadap modal usaha berdampak pada rendahnya produktivitas, terhambatnya pemasaran produk pertanian dan rendahnya harga produk di tingkat petani. Untuk tanaman pangan utama, misalnya padi, produktivitas padi sawah di Bengkulu baru mencapai 4,06 ton/ha gabah kering giling (GKG), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produktivitas nasional yang mencapai 4,56 ton/ha, sedangkan produktivitas tanaman jagung baru mencapai 1,87 ton/ha.

Di sisi lain, proses alih teknologi ke petani masih rendah, terutama yang berhubungan dengan penanganan pasca panen, sehingga nilai tambah produk pertanian juga rendah. Pada subsektor perkebunan, teknologi yang diterapkan petani juga kurang memadai, karena kurang permodalan. Untuk komoditi unggulan seperti karet, banyak petani yang belum menggunakan benih/bibit berkualitas dan belum melakukan pengelolaan tanaman secara optimal, oleh karenanya produktivitasnya juga rendah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah meningkatkan kualitas sumberdaya petani melalui penguasaan teknologi dan akses modal agar produktivitas hasil pertanian per satuan luas lahan dan nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan meningkat.

Di subsektor peternakan, produktivitas juga terhambat akibat kelangkaan bibit yang berkualitas dan mahalnya harga pakan. Populasi ternak baik ruminansia maupun ternak unggas, serta perikanan darat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ternak yang ada di masyarakat pada umumnya berkembang biak secara alami sehingga kontrol terhadap kualitas bakalan yang dihasilkan sama sekali tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, strategi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk peternakan dapat diawali dengan peningkatan penguasaan teknologi yang berhubungan dengan kedua permasalahan tersebut.

Lembaga dan posisi tawar petani yang lemah berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran. Nilai tambah produk pertanian



justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku ekonomi yang bergerak di bidang tataniaga terutama di kawasan perkotaan, sementara yang dinikmati masyarakat perdesaan masih sangat rendah. Jaringan informasi pasar sepenuhnya dikuasai pelaku tataniaga sehingga petani tidak dapat melakukan akses terhadap informasi tersebut. Akibatnya, harga produk di tingkat petani lebih banyak ditentukan oleh pelaku tataniaga di perkotaan.

Mengingat sebagian besar permasalahan di sektor pertanian berhubungan dengan sumberdaya petani yang hidup di kawasan perdesaan, maka strategi pemecahan masalah tersebut hendaknya juga difokuskan pada upaya revitalisasi pertanian di kawasan perdesaan. Strategi umum yang dapat ditempuh adalah melalui upaya modernisasi perekonomian perdesaan, dimana kawasan pedesaan tidak lagi dianggap sebagai pensuplai kebutuhan di perkotaan, terutama yang berupa bahan-bahan baku, melainkan harus difungsikan sebagai mitra dari kawasan perkotaan. Sebagai mitra, masyarakat yang tinggal kawasan perdesaan dapat berbuat sama dengan yang dilakukan masyarakat perkotaan. Konsekuensinya, faktor-faktor pendukung produktivitas di kawasan perdesaan seperti teknologi dan permodalan juga harus tersedia sama baiknya dengan di kawasan perkotaan.

Peran koperasi dan usaha kecil-menengah dalam perekonomian daerah sangat penting karena merupakan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi sebagian besar rakyat Kabupaten Rejang Lebong. Majunya usaha kecil dan menengah (UKM) akan sangat mendukung upaya mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi baik antar pelaku, antar golongan pendapatan dan antar daerah, termasuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Melalui keberadaan UKM yang tangguh dapat dijamin keberlangsungan penyediaan lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Peran UKM dalam perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja.

Akan tetapi, peningkatan dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UKM khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Keadaan ini sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan internal UKM yang belum memadai, yaitu:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran;
- b. Lemahnya rata-rata kompetensi kewirausahaan; dan
- c. Terbatasnya kapasitas UKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Di samping itu, UKM di Rejang Lebong juga menghadapi beberapa permasalahan yang bersumber dari lingkungan eksternal (iklim usaha) yang tidak kondusif, seperti:

- a. Besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan
- b. Praktik usaha yang tidak sehat.

Timbulnya permasalahan eksternal ini terkait dengan banyak faktor, seperti: kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global.

Agar UKM mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar ekspor dalam era perdagangan bebas, maka lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang menjadi sumber permasalahan harus dapat diperbaiki. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga kelangsungan dan perkembangan UKM sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tetap terjamin.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah masih rendahnya kualitas manusia yang terkait dengan kedua sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya alam (mineral, pertanian, perikanan, hutan dan air) dan lingkungan hidup masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan manusia yang terus meningkat dan bersifat eksploitatif mengakibatkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **Output:**

Output pembangunan bidang ini adalah terwujudnya masyarakat sejahtera melalui optimalisasi sumber daya di Kabupaten Rejang Lebong yang dapat ditunjukkan oleh:

- a. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita per tahun yang mendekati PDRB Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku diharapkan mencapai Rp.21.900.000,-, atau meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan PDRB tahun 2003 sebesar Rp. 3.842.100,-. Target tersebut dicapai dengan asumsi bahwa PDRB per kapita naik sekitar 13.5% per tahun sebagaimana yang dialami Provinsi Bengkulu pada periode 1998 – 2003.
- b. Penghasilan mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 berada di atas standar garis kemiskinan global, yakni minimal Rp. 29.000,- di kota dan Rp. 23.780,- di desa, dengan asumsi bahwa laju inflasi yang mempengaruhi biaya untuk memenuhi kebutuhan minimal per hari adalah 6% per tahun.
- c. Jumlah pengangguran diharapkan menurun dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5% pada tahun 2025. Upaya ini akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan optimalisasi sumberdaya ekonomi dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan PAD.

- d. Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor unggulan, terutama yang tergabung dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, meningkat rata-rata 10% per tahun.
- e. Sarana dan prasarana umum (jalan, jembatan, jaringan irigasi dan saluran drainase di kawasan permukiman) di Kabupaten Rejang Lebong yang terpelihara mencapai 80%, sedangkan sarana dan prasarana pelayanan publik (perkantoran, sekolah, kesehatan) yang terpelihara mencapai 90%.
- f. Tersedianya kebutuhan air minum berkualitas dan berkelanjutan bagi 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk perdesaan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025.

Output lain adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong yang dapat ditunjukkan oleh:

- a. Terwujudnya tertib administrasi dan sistem informasi pertanahan digital dimana 80% dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki kepastian hukum hak atas tanah.
- b. Terkendalinya kelestarian sumber daya hutan melalui program transmigrasi lokal dan penegakan hukum dengan realisasi sebesar 0,25% per tahun.
- c. Terwujudnya satuan tugas (SATGAS) penanggulangan bencana alam minimal 10 orang di setiap desa/kelurahan.

#### **D. Sosial Budaya dan Politik**

##### **Input:**

Pembangunan bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kualitas seperti pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana dan lingkungan.

Taraf pendidikan penduduk Kabupaten Rejang Lebong sampai tahun 2003 mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya proporsi penduduk usia di atas 15 tahun yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SLTP) atau lebih tinggi menjadi 39,26%. Angka partisipasi murni penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 97.36%, usia 13 – 15 tahun mencapai 85.81%, dan usia 16 – 18 tahun sebesar 52.49%.

Sarana dan prasarana bidang pendidikan pada tahun 2004 meliputi SLTA Negeri sebanyak 11 unit, SLTP Negeri 23 unit, SD Negeri 181 unit, SDLB 1 unit, dan TK Negeri 1 unit. Jumlah SDM pendidikan yang terlibat mencapai 2.962 orang yang terdiri dari tenaga guru, pengawas sekolah dan penilik bidang pendidikan. Masalah pemerataan kesempatan mendapatkan pelayanan pendidikan dasar menunjukkan bahwa ada sejumlah 20 desa dari 147

desa/Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong yang tidak memiliki SD. Demikian pula kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia pada sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Rejang Lebong sejauh ini belum memadai.

Di bidang kesehatan, status kesehatan penduduk masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari angka kematian bayi yang meningkat dari 7,2 pada tahun 2003 menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004, sedangkan angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 115 menjadi 131 per 100.000 pada tahun yang sama. Umur harapan hidup berkisar antara 64 sampai 65 tahun pada periode 1996 – 2003, sementara prevalensi gizi kurang pada anak yang berumur di bawah lima tahun (balita) adalah sebesar 15,7% pada tahun 2003.

Infrastruktur kesehatan yang tersedia di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2003 masih didominasi kelas Puskesmas Pembantu yang berjumlah 56 unit dan tersebar merata di semua kecamatan. Jumlah Puskesmas Keliling adalah 12 unit dan Puskesmas 13 unit yang tersebar di semua kecamatan, sedangkan Rumah Sakit sebanyak 2 unit yang semuanya berada di Kecamatan Curup.

Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri, seperti: penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter masyarakat, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan aspek kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2000 – 2003, jumlah rumah tangga di enam kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang termasuk kategori pra-sejahtera meningkat dari 8,26% pada tahun 2000 menjadi 12,83% pada 2001 dan 2002, dan 13,23% pada 2003, sedangkan yang termasuk sejahtera I meningkat dari 16,73% pada 2000 menjadi 27,44% pada 2001 dan 2002, dan 30,35% pada 2003. Peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera dan sejahtera I tersebut diikuti oleh penurunan jumlah penduduk yang termasuk kategori sejahtera secara drastis, yakni dari 17,89% pada tahun 2000 menjadi 12,29% pada 2000 dan 2001, dan 2,04% pada 2003. Sementara jumlah penduduk yang termasuk kategori sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus relatif konstan pada periode tersebut.

Kualitas manusia mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Pengelolaan SDA (mineral, minyak dan gas, perikanan, hutan dan air) dan lingkungan hidup masih belum

menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan manusia yang terus meningkat dan bersifat eksploitatif mengakibatkan SDA terus mengalami degradasi. Namun sejak tahun 2004, kualitas SDA tersebut sudah mulai meningkat karena ditunjang oleh adanya penegakan hukum yang semakin baik serta adanya kontrol oleh masyarakat.

Pembangunan Politik di Rejang Lebong secara umum sudah semakin baik, hal ini di tandai dari proses demokratisasi telah berjalan pada arah yang benar. Demikian pula antusias masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis, maka adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistim multi partai yang mengikuti Pemilu serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum forum lainnya, menjadi model yang sangat penting dalam mewujudkan proses demokratisasi ke depan.

Dengan diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung maka hak hak rakyat akan semakin terakomodasi. Namun demikian, sebagai tahapan awal dari era demokrasi akan banyak permasalahan yang muncul disekitar Pemilihan Kepala Daerah baik mulai tahapan pengusulan pelaksanaan pemungutan suara. Pemungutan suara yang aman akan menjamin Kepala Daerah yang representatif dan memiliki dukungan masyarakat. Masyarakat (*civil society*) yang kuat akan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu penguatan kelembangan menjadi tugas bersama sebagai langkah mempercepat masyarakat madani.

Di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, berbagai masalah gangguan keamanan dan kejahatan yang timbul sebagai akibat dari krisis multi dimensi semakin dapat dikendalikan, dan ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Rasa aman di Rejang Lebong merupakan kebutuhan bersama dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dan aparat keamanan, karena secara keseluruhan penanganan masalah kriminalitas dan tindak kejahatan masih menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat melalui lembaga Kepolisian. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya harus menjaga dan mencegah peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasasi sosial, sehingga masyarakat dalam beraktivitas dapat terayomi, untuk itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan pemahaman HAM serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan dengan Sistem Keamanan Swakarsa.

Keberhasilan pembangunan tersebut di atas belum didukung oleh pencapaian pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif hal ini dapat dilihat dari besaran indeks kejahatan/kriminalitas. Jika pada Tahun 1999 (117,99) yang dijadikan dasar perhitungan bahwa ada kecenderungan angka indeks kriminalitas yang terus meningkat tahun 2000 sebesar 160,58 dan tahun 2001 sebesar 170,95. Angka kriminilitas dari tahun ketahun ada kecedrungan terus miningkat, pada tahun 1999 berjumlah 282 kasus, tahun 2000 menjadi 387, dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 392 kasus. Dari

jumlah kasus tersebut klasifikasi kejahatan di Rejang Lebong pada tahun 2003 didominasi oleh kejahatan pencurian 137 kasus, penganiayaan berat 45 kasus pembunuhan 13 kasus, kejahatan terhadap perempuan 11 kasus, narkoba 5 kasus, selain kejahatan-kejahatan konvensional lainnya.

Di Bidang Hukum yang tidak bisa dipisahkan dari politik, kondisi penegakan hukum di Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Produk hukum seperti Peraturan Daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah ditingkatkan agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat Rejang Lebong, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (*responsif*).

Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum serta menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, budaya hukum, dan tertib hukum;
- b. Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2004 sebanyak 4 buah, Keputusan Bupati 581 buah dan tahun 2005 sebanyak 2, Keputusan Bupati 307 buah, Peraturan Bupati 2 buah.
- c. Menerbitkan Lembaran Daerah tahun 2004 sebanyak 4 buah, Pada tahun 2005 menerbitkan 2 buah Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah 2 buah, Rancangan Peraturan Daerah yang proses sebanyak 11 buah;
- d. Menangani penyelesaian sengketa/perkara di Pengadilan untuk tahun 2002 sebanyak 275 perkara, dan tahun 2003 sebanyak 253 perkara di Tingkat pertama.
- e. Menerbitkan Himpunan Peraturan Daerah sebanyak 80 buku pada tahun 2004.

### **Analisis:**

Di bidang sosial budaya, Kabupaten Rejang Lebong memiliki berbagai peluang untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik, berkebudayaan dan berperikehidupan politik yang maju. Di bidang pendidikan minat dan kemauan yang besar masyarakat Rejang Lebong untuk memperoleh pendidikan, merupakan peluang yang besar bagi peningkatan angka partisipasi sekolah. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anggota keluarga mereka yang memiliki usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikannya hingga kejenjang perguruan tinggi. Nilai nilai kemasyarakatan yang telah berkembang pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong adalah merasa malu bila memiliki anggota keluarga usia sekolah yang tidak bersekolah.

Di samping itu, terdapat fakta akibat perubahan sosial budaya dan ekonomi yang terlalu cepat yaitu masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum optimal, kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan masih rendah, dan belum mampu beradaptasi dengan perubahan global, karena itulah, masalah pemerataan memperoleh pendidikan dan kualitas produk pendidikan dari lembaga pendidikan menjadi masalah yang paling pokok (mendasar). Dari sisi muatan pendidikan, muatan lokal pada kurikulum masih belum memadai untuk bersaing di pasar kerja.

Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM. Penyediaan pelayanan pendidikan kecakapan hidup sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

Kesenjangan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Apabila tidak segera diatasi maka kondisi seperti ini dapat menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong. Kesenjangan tersebut terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, dan antara penduduk di perkotaan dan di penduduk di perdesaan.

Tingkat pengangguran yang tinggi masih merupakan tantangan serius yang akan dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selama 20 tahun ke depan. Tingginya pengangguran tersebut dipicu oleh terbatasnya keanekaragaman keahlian dan keterampilan penduduk, dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja terutama di sektor formal. Sementara di era ekonomi global, tuntutan dunia kerja akan keterampilan, keahlian dan kompetensi pekerja semakin meningkat.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Rejang Lebong masih rendah dan kualitas pelayanan kesehatan belum memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan terutama tingkat SLTP dan SLTA belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Kualitas pendidikan masih mengalami ketimpangan antar satuan-satuan pendidikan dan antar kecamatan. Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan adalah desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana.

Disamping itu minat dan kemampuan yang cukup besar dari tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menunjang proses belajar-mengajar juga merupakan modal dasar peningkatan kualitas belajar-mengajar. Sementara pemerataan pendidikan pada semua strata masyarakat akan terealisasi karena komitmen yang kuat dari pemerintah dalam

meningkatkan aksesibilitas pendidikan serta dalam rangka membebaskan biaya pendidikan.

Pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM. Di bidang pendidikan masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

1. Rendahnya kualitas lulusan para siswa;
2. Rendahnya kualitas proses belajar mengajar;
3. Rendahnya kemampuan mengajar dari kalangan guru-guru;
4. Rendahnya manajemen pendidikan;
5. Rendahnya penerapan teknologi pendidikan;
6. Rendahnya cara melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar, dan sebagainya.

Di bidang kesehatan, masyarakat telah memiliki kesadaran pentingnya hidup sehat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah kunjungan penduduk ke Puskesmas dan Rumah Sakit yang semakin meningkat. Pada tahun 2004 perbandingan jumlah pengunjung perseratus ribu penduduk sebesar 1,27. Komitmen pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan beserta tenaga medisnya juga semakin membaik.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, peningkatan upaya kesehatan, memperkecil angka kesakitan dan kematian, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, serta meningkatkan kualitas program keluarga berencana. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Dalam pembangunan kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas pelayanan kesehatan dan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. Tantangan penting lainnya adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, serta belum optimalnya pembiayaan kesehatan termasuk pola alokasinya.

Menyangkut bidang kesehatan maka secara umum permasalahan dibidang kesehatan adalah kualitas pelayanan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat



yang kurang serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Disisi lain belum semua tenaga kesehatan memenuhi kompetensi profesi terkait untuk dapat terregistrasi sebagai tenaga kesehatan profesional. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi pada masyarakat miskin karena kendala biaya (*cost barrier*).

Permasalahan bidang kesehatan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal dan belum merata serta terjangkaunya pelayanan kesehatan
2. Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah
3. Terjadinya beban ganda penyakit dan rawan bencana.
4. Kualitas lingkungan yang belum mendukung distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata
5. Rendahnya akses kesehatan penduduk miskin

Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan mutu keluaran pendidikan.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, tantangan yang dihadapi di Kabupaten Rejang Lebong adalah belum mantapnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas manajemen masyarakat partisipatif dan peran kelembagaan masyarakat desa/kelurahan masih lemah dalam pembangunan desa. Sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan masyarakat di perdesaan juga masih sangat terbatas.

Permasalahan kemiskinan umumnya berkaitan dengan terbatasnya lapangan kerja dan kenaikan upah yang lambat dalam menyesuaikan terhadap kenaikan harga. Stagnasi upah dan peningkatan harga mengakibatkan masyarakat kurang mampu di perkotaan tergolong sebagai penduduk miskin.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Rejang Lebong antara lain disebabkan:

1. Penanganan kemiskinan bersifat parsial/menyebar/tidak fokus.
2. Pendapatan masyarakat miskin masih rendah, rata-rata di bawah upah minimum regional (UMR).

3. Kinerja penurunan angka kemiskinan masih semu (tidak jelas), mengingat indikator kinerja terlalu luas dan hanya menyentuh permukaan.
4. Penanganan kemiskinan, belum mengakomodasi tipologi desa, kultur budaya masyarakat dan teknologi tepat guna.
5. Kualitas kesehatan, pendidikan, lingkungan permukiman, usaha dan produktivitas masih rendah.
6. Rendahnya akses informasi.

Kemiskinan juga berhubungan erat dengan permasalahan sosial dimana kemiskinan akan menyebabkan meningkatnya gelandangan dan anak jalanan. Kemiskinan juga berhubungan dengan akses terhadap pendidikan maupun informasi.

Disamping itu kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai, partisipasi pemuda dalam pembangunan masih belum optimal, serta budaya dan prestasi olahraga masih rendah. Demikian pula, beban permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya eksekse dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam. Sementara itu, kebutuhan sosial dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Di bidang kebudayaan, budaya masyarakat Rejang Lebong merupakan aset potensial dalam pembangunan yang ditandai dengan karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis, dan agamis yang merupakan modal dasar dalam pembangunan.

Potensi kepemudaan juga tak kalah penting merupakan aset yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong untuk menggerakkan ekonomi perdesaan didukung pula minat dan potensi masyarakat Rejang Lebong untuk mengembangkan keolahragaan yang cukup tinggi.

Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal.

Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama.

Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Kondisi politik, hukum, dan keamanan yang kondusif merupakan prasarat bagi tumbuh dan berkembangnya pembangunan disegala bidang. Dalam pembangunan ekonomi, keberadaan investasi merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu suatu iklim politik yang baik, terjaminnya kepastian hukum, serta keamanan yang mendukung adalah menjadi pertimbangan utama bagi para investor dalam menanamkan investasinya di suatu daerah.

Suasana kehidupan politik di Kabupaten Rejang Lebong lima tahun terakhir secara kualitatif menunjukkan suatu suasana yang sangat kondusif, hal ini ditandai dengan tingginya partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti proses politik yang terjadi di daerah, yang dimulai dengan Pemilihan Umum Legeslatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta dua tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang sangat baik. Demikian juga dengan pasca proses politik menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi hal ini ditandai dengan kesadaran untuk menerima hasil proses politik tersebut dengan tanpa gejolak.

Tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya tingkat pelanggaran hukum. Hal ini ditandai dengan masih tingginya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Kondisi ini merupakan indikasi masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ini tentunya bukan saja akan menimbulkan ketidakteraman tetapi akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi ke Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu persolan kesadaran hukum dan penegakan hukum ke depan masih perlu untuk ditingkatkan.

### **Output:**

Pembangunan bidang sosial budaya bertujuan mewujudkan masyarakat yang damai, nilai-nilai luhur budaya lokal yang berkembang dan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Rejang Lebong yang akan ditunjukkan oleh:

- a. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang kondusif tanpa terjadi konflik vertikal dan horizontal. Segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Terwujudnya penerapan hukum adat Rejang Lebong di Kabupaten Rejang Lebong secara maksimal.
- c. Terwujudnya 90% pemerintahan desa/kelurahan yang mandiri (efektif dan efisien dalam menyelenggarakan roda pemerintahan), 85% sistem administrasi dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan yang efektif dan efisien, 85% kelembagaan masyarakat dan kelembagaan sosial yang mandiri di desa/kelurahan.

Pembangunan bidang sosial budaya juga bertujuan mewujudkan SDM masyarakat Kabupaten Rejang Lebong berkualitas yang antara lain akan ditunjukkan oleh:

- a. Proporsi penduduk usia di atas 15 tahun yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SLTP) atau lebih tinggi adalah minimal 50%, angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 99%, usia 13 – 15 tahun mencapai 89%, usia 16 – 18 tahun sebesar 61%, dan usia 18 – 24 tahun yang sekolah di perguruan tinggi sebesar 21%. Target tersebut dicapai dengan asumsi bahwa pembangunan pendidikan mampu meningkatkan rata-rata taraf pendidikan anak usia sekolah minimal 2,0% per tahun.
- b. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang sudah mengkonsumsi air bersih dan memiliki jamban saniter mencapai 90%, angka kematian ibu melahirkan kurang dari 120 per 100.000 penduduk, angka kematian balita kurang dari 15 per 1.000 penduduk, dan jumlah pemukiman penduduk yang dalam keadaan lingkungan sehat mencapai 70%. Minimal 95% kebutuhan pelayanan sosial kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dapat terpenuhi. Target di atas dapat dicapai apabila tersedia pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dan tersedianya obat-obatan serta ketatnya pengawasan terhadap makanan dan bahan berbahaya.
- c. Tersedianya 99% data dan informasi keluarga berencana, 99% penduduk usia remaja sudah memahami kesehatan reproduksi, 95% keluarga sudah tergolong kelas keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus, 99% pasangan usia subur sudah mengikuti program keluarga berencana, dan 100% kelembagaan dan jaringan keluarga berencana sudah tergolong paripurna.
- d. Minimal 5% penduduk Kabupaten Rejang Lebong merupakan tenaga terampil di berbagai bidang seperti bangunan, otomotif dan elektronika sehingga tersedia minimal 1 tenaga mekanik untuk 3 desa/kelurahan. Rasio ketersediaan tenaga operator alat-alat pertanian minimal 1 orang untuk 20 ha lahan usaha tani.
- e. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- f. Tersedianya standar pelayanan pendidikan Kabupaten serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten.

Sasaran pembangunan kesehatan di Rejang Lebong pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui peningkatan jangkauan / akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
- b. Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak Balita.

- c. Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- d. Meningkatnya cakupan sarana kesehatan dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat yang dapat diakses masyarakat.
- e. Peningkatan mutu SDM kesehatan yang terakreditasi.
- f. Meningkatnya akses sistem informasi kesehatan.

Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar;
- b. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- d. Terpenuhinya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- f. Meningkatnya mutu profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Dibidang keagamaan, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama sampai dengan tahun 2025 adalah:

- a. Sekitar 90% penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang beragama Islam dapat membaca Alqur'an pada tahun 2025.
- b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan shodaqoh dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
- d. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai.
- e. Infrastruktur keagamaan meningkat yang ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren Modern, berfungsinya perangkat keagamaan di desa

dan kelurahan, dan berkurangnya angka perceraian dan pernikahan di bawah umur.

- f. Praktek prostitusi, minuman keras, narkoba dan perjudian menghilang dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- g. Target tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh kondisi kehidupan beragama yang kondusif, sarana dan prasarana keagamaan yang lengkap, dan tersedianya peraturan tentang perlindungan nilai-nilai agama.

Keberhasilan pembangunan politik di kabupaten Rejang Lebong 20 tahun ke depan ditandai dengan:

- a. Berkembangnya iklim demokrasi.
- b. Berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap supremasi hukum.
- c. Berkembangnya proses dan tuntutan reformasi politik dan hukum.
- d. Tingginya dukungan masyarakat dalam melaksanakan agenda reformasi
- e. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan *good governace* di lingkungan birokrasi.

## **E. Prasarana dan Sarana**

### **Input:**

Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di semua bidang. Sebagai contoh, infrastruktur transportasi berfungsi sebagai pelayanan dalam penyediaan jasa transportasi yang berguna untuk mendorong pemerataan pembangunan, baik di perkotaan maupun perdesaan, untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa, serta untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah. Transportasi juga sangat diperlukan dalam menjembatani kesenjangan dan untuk mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dilewati oleh jalan negara sepanjang 84 km, jalan provinsi sepanjang 342,5 km, jalan kabupaten sepanjang 1.676,82 km, jalan lingkungan di Kota Curup sepanjang 55,7 km, dan jalan kecamatan sepanjang 197,55 km.

Sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki jalan, baik jalan aspal maupun jalan tanah, namun kondisinya sudah agak rusak. Oleh sebab itu, kualitas jalan perlu ditingkatkan, misalnya dengan perbaikan dan pengaspalan jalan yang telah rusak, guna memperlancar angkutan orang dan barang dengan membuka akses ke daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan perekonomian masyarakat yang perlu dipacu pertumbuhannya. Ruas-ruas jalan penghubung antara Kabupaten Rejang Lebong dengan daerah-daerah lain perlu ditingkatkan terutama yang menghubungkan daerah-daerah yang potensial untuk kerjasama perdagangan dan industri.

Tabel 2.1. Data Jaringan Jalan Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Jalan (km)				
	Negara	Propinsi	Kabupaten	Kota Curup	Kecamatan
I. Jenis Permukaan	<b>84,00</b>	<b>342,5</b>	<b>1676,82</b>	<b>55,7</b>	<b>197,55</b>
1) Aspal	84,00	330,53	424,16	55,7	61,8
2) Kerikil	-	12	66,6	-	23,35
3) Tanah	-	-	646,7	-	112,4
4) Tidak Dirinci	-	-	538,55	-	-
II. Kondisi Jalan	<b>84,00</b>	<b>342,5</b>	<b>1676,82</b>	<b>55,7</b>	<b>197,55</b>
1) Baik	84,00	302,344	318,87	55,7	61,8
2) Sedang	-	8,5	603	-	23,35
3) Rusak	-	19,7	179,5	-	112,4
4) Rusak berat	-	-	575,45	-	-
III. Kelas Jalan	<b>84,00</b>	<b>342,5</b>	<b>1676,82</b>	<b>55,7</b>	<b>197,5</b>
1) Kelas I	-	-	-	-	-
2) Kelas II	84,00	-	-	-	-
3) Kelas III	-	117,4	-	55,7	-
4) Kelas III A	-	106,45	-	-	-
5) Kelas III B	-	-	424	-	-
6) Kelas III C	-	-	271	-	-
7) Tidak Dirinci	-	118,65	982	-	197,55
IV. Fungsi Jalan	<b>84</b>	<b>342,5</b>	<b>1676,82</b>	<b>55,7</b>	<b>197,5</b>
1) Arteri	84	-	-	-	-
2) Kolektor	-	117,4	424	55,7	-
3) Lokal	-	106	271	-	-

Sumber : Dinas Kimpraswil Kab. Rejang Lebong 2004

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki stasiun kereta api. Sarana jalan kereta api di Provinsi Bengkulu baru terdapat di stasiun Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam rencana jangka panjang Provinsi Bengkulu, sarana ini akan dikembangkan menjadi sistem pelayanan angkutan kereta api yang lebih menjangkau wilayah-wilayah di Provinsi Bengkulu. Pada saat ini sudah dilakukan survei, sedangkan pada tahun 2006 akan dilakukan pembangunan jalan kereta api tahap satu. Dalam rencana pembangunan jalan kereta api, akan dibuka jalan rel yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, dengan rute: Sukaraja – Kepahiang – Kota Padang – Lubuk Linggau (Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan).

Jaringan irigasi merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam pembangunan pertanian terutama tanaman bahan pangan. Luas areal irigasi potensial di Kabupaten Rejang Lebong setelah pemekaran pada tahun 2004 adalah 9.163,75 ha, terdiri dari areal irigasi teknis seluas 3.715 ha, setengah teknis 3.859 ha dan sederhana 1.589,75 ha. Luas areal irigasi fungsional adalah 5.366 ha, terdiri dari areal irigasi teknis 1.737 ha, setengah teknis 2.612 ha dan sederhana 1.017 ha. Panjang saluran irigasi total adalah 94.822,50 m, terdiri dari saluran irigasi teknis 33.123 m, setengah teknis 41.921,50 m dan sederhana 19.778 m. Areal irigasi fungsional terluas terdapat di Kecamatan Curup dan Kecamatan Selupu Rejang, sedangkan yang tersempit terdapat di Kecamatan Sindang Kelingi.

Prasarana bidang ketenaga-listrikan berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian daerah, dimana sumber energi kelistrikan sangat diperlukan untuk

mendukung pengembangan pembangunan pada bidang industri, jasa dan telekomunikasi. Bidang telekomunikasi di daerah merupakan prasarana untuk mempercepat akses informasi, baik informasi dalam bidang perdagangan, pasar, pendidikan, teknologi dan pelayanan jasa.

Prasarana air bersih dan perumahan merupakan dua bidang yang saling berhubungan. Pembangunan prasarana air bersih merupakan upaya untuk memberikan akses secara adil dan terjangkau kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air bersih agar mampu kehidu yang sehat, bersih, dan produktif. Infrastruktur bidang perumahan merupakan kebutuhan pokok, dimana untuk melangsungkan kehidupannya sangat diperlukan perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat.

### **Analisis:**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dikelompokkan berdasarkan bidang pembangunannya, meliputi bidang transportasi, sarana pengairan irigasi, prasarana energi listrik, prasarana telekomunikasi, sarana perumahan dan pemukiman, dan sarana air bersih. Di bidang transportasi, kualitas sebagian jalan yang ada, baik jalan negara maupun jalan provinsi dan jalan kabupaten, masih rendah sebagai akibat terbatasnya dana pemeliharaan. Jalan-jalan usaha tani belum mampu menjangkau sebagian besar sentra-sentra produksi yang tersebar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pembangunan jaringan jalan kereta api memerlukan dana yang cukup besar termasuk untuk biaya pemeliharaan.

Pembangunan sarana pengairan irigasi dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air, jaringan yang lama rata-rata sudah banyak yang tidak berfungsi (rusak), dan tidak berjalannya sistem pengaturan air. Beberapa jaringan irigasi, seperti Daeah Irigasi Musi Kejalo di Kecamatan Bermani Ulu, megalami kehilangan air secara berlebihan sehingga tidak mampu mengairi lahan sebagaimana direncanakan semula.

Di bidang energi listrik, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan kapasitas pembangkit, karena kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu untuk melayani permintaan akan listrik, sebagian besar pelayanan hanya terdapat di daerah perkotaan, tingginya ketergantungan terhadap BBM, dan keterbatasan kemampuan pendanaan. Permasalahan infrastruktur telekomunikasi adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi, tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur informasi.

Permasalahan di bidang permukiman adalah terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan, masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan yang belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya sistem perumahan dan lingkungan, terutama di daerah permukiman nelayan, daerah pelabuhan dan daerah permukiman sekitar pasar, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak. Di bidang penyediaan air bersih, permasalahannya adalah masih sedikitnya jumlah



pelanggan yang menggunakan air PDAM, tingginya tingkat kebocoran yang terjadi pada perpipaan, dan permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya.

### **Output:**

Pembangunan jangka panjang di bidang prasarana dan sarana di Kabupaten Rejang Lebong selama 20 tahun ke depan akan menghasilkan target capaian sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, lancar dan terkendali dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bertambahnya ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang berfungsi sebagai penghubung Kabupaten Rejang Lebong dengan daerah-daerah lain, baik di dalam maupun di luar Provinsi Bengkulu.
3. Berkembang dan meratanya cakupan pelayanan telpon dan listrik di semua wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Meningkatkan dan terpeliharanya infratraktur bidang irigasi dan drainase, baik melalui fasilitasi pemerintah maupun partisipasi masyarakat seperti Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A).
5. Tersedianya perumahan dan prasarana pendukungnya (jalan, air bersih, listrik, telpon) yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
6. Minimal 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk perdesaan sudah menikmati pelayanan air minum.

## **F. Pemerintahan**

### **Input:**

Pemerintahan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Sumber Daya Pemerintahan yang berkualitas mutlak diperlukan. Demikian juga kelembagaan pemerintahan yang baik sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan. Struktur pemerintahan yang besar ada kecenderungan menimbulkan pemerintahan yang korup, oleh karena itu ke depan diperlukan struktur pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan.

Permasalahan pemerintahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini termasuk juga di Rejang Lebong masih berkisar pada persoalan klasik baik menyangkut SDM maupun kelembagaan. Di Kabupaten Rejang Lebong masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara seksama, khususnya berkaitan dengan terbatasnya kemampuan aparat pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan serta penyelenggaraan urusan publik kepada masyarakat belum optimal. Belum efektifnya unit-unit organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belum berkembangnya

Teknologi Informasi di lingkungan pemerintah. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Masih ada KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang pemerintahan adalah belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun demikian hasil yang dicapai belum menggembirakan. Kelembagaan pemerintah yang ada di daerah masih belum efektif dalam melaksanakan tugas dan sistem manajemen pemerintahan daerah, disamping belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah.

### **Analisis:**

Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten yang baru saja mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten tentunya mempunyai persoalan tersendiri di bidang pemerintahan. Pertama harus menata ulang kelembagaan pemerintahan, sebagai akibat berpindahnya SDM yang ada ke Kabupaten baru, kondisi ini tentunya berpengaruh kepada roda pemerintahan baik kualitas maupun kuantitas. Bahkan SDM yang berkualitas ada kecenderungan memilih kabupaten baru.

Lemahnya pelayanan publik pada pemerintahan Rejang Lebong sangat dipengaruhi oleh:

1. Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki.
2. Penempatan SDM pada bidang kerja yang tidak berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur yang bersangkutan.
3. Terjadinya perubahan paradigma dalam pemerintahan yang tidak diikuti oleh paradigma berpikir aparatur.

Selain itu dalam penataan kelembagaan lebih berorientasi pada pemerataan dan bukan pada kebutuhan, dengan demikian ada kecenderungan menimbulkan birokrasi yang besar dan tidak efisien.

Tantangan ke depan adalah dengan semakin kuatnya arus globalisasi ekonomi yang mau tidak mau kita harus berada di dalamnya, membutuhkan aparatur pemerintah yang tangguh yang dapat memainkan perannya dalam kancah pergaulan dunia tersebut. Oleh karena itu aparatur pemerintah yang menguasai teknologi informasi dan mampu membangun jejaring sangat dibutuhkan pemerintah kabupaten Rejang Lebong. Masyarakat di berbagai desa di Kabupaten Rejang Lebong masih diliputi rasa tidak aman akibat tindak kriminalitas, kejahatan dan kekerasan. Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan penduduk, rumah tangga dan usaha masih sering terjadi. Di sisi lain, kemampuan personil dan peralatan penegak hukum masih belum memadai.

Ketidak pastian hukum yang masih tinggi mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegakan hukum masih rendah. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan kriminalitas umum semakin meningkat.

Upaya menciptakan sistem pemerintahan yang bersih menghadapi berbagai kendala seperti belum adanya komitmen moral bersama dari aparatur negara, masih rendahnya kapasitas dan kesejahteraan aparatur, dan belum tuntasnya reformasi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat belum sepenuhnya terjalin.

Tantangan lain yang dihadapi dalam rangka mempecepat pelaksanaan pembangunan adalah belum berjalan sepenuhnya proses desentralisasi. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektor yang masih belum disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih sering berbeda. Kerjasama antar pemerintah daerah juga masih rendah, kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien belum terbentuk, serta masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah.

#### **Output:**

Keluaran yang diharapkan dengan pembangunan pemerintahan adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang ditandai dengan:

- a. Tertatanya kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan daerah yang antara lain tercermin dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan menjadi teladan bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Terwujudnya kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah sehingga investasi masuk ke Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapat hambatan birokrasi.

### **G. Wilayah dan Tata Ruang**

#### **Input:**

Perwilayahan dan penataan ruang merupakan dokumen perencanaan daerah yang pertama kali dibuat sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan di suatu daerah atau wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Pembangunan harus berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka panjang agar tidak menimbulkan

eksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Penataan ruang juga diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, seperti antara kehutanan dan pertambangan. Konflik antar sektor tersebut dapat dihindari melalui penerapan 'Rencana Tata Ruang' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan kebijaksanaan pemerintah berupa pemekaran wilayah administrasi pemerintahan. Adapun pemekaran wilayah administrasi tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2003, dimana Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong (sebagai kabupaten induk), Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (sebagai kabupaten yang dimekarkan).

### **Analisis:**

Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan merata di semua kawasan. Sebagian kawasan sudah berkembang dengan pesat, sementara kawasan lain masih jauh tertinggal. Beberapa kawasan yang masih tertinggal tersebut adalah wilayah Kecamatan Kota Padang, sebagian Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Bermani Ulu.

Guna meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan di semua kawasan maka perlu dikembangkan paradigma baru pembangunan dengan orientasi pada pembangunan kawasan, bukan pembangunan sektoral. Rencana Tata Ruang Kabupaten Rejang Lebong harus mampu mengangkat potensi unggulan di masing-masing kawasan, sehingga kawasan-kawasan yang memiliki potensi sejenis dapat dijadikan suatu gugus (*cluster*) dalam pembangunan. Pola pembangunan yang demikian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan sehingga hasil yang diperoleh akan semakin nyata.

Berdasarkan sebaran potensi wilayah yang dimiliki, maka pembangunan kawasan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dipilah menjadi tiga gugus sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Curup dan Kecamatan Bermani Ulu dapat dikembangkan sebagai gugus pengembangan persawahan irigasi dan perikanan darat, termasuk berbagai model integrasi antara ternak dan tanaman.
2. Wilayah Kecamatan Selupu Rejang dan Kecamatan Sindang Kelingi dapat dikembangkan menjadi gugus pengembangan hortikultura, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, yang berorientasi agribisnis.
3. Pembangunan wilayah Kecamatan Kotam Padang dan Padang Ulak Tanding dapat dipercepat melalui pengembangan tanaman perkebunan terutama tanaman karet dan kakao.

### **Output:**

Keluaran yang diharapkan dengan pembangunan perwilyahan dan penataan ruang adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ditandai dengan:

1. Terwujudnya pemanfaatan wilayah dan ruang dalam jangka waktu tidak terbatas tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya.
2. Terwujudnya produktivitas lahan yang tinggi dan konstan dari tahun ke tahun sebagai wujud dari pemanfaatan lahan secara berkesinambungan.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram tanpa adanya konflik pemanfaatan wilayah ruang, baik antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah, maupun antara pemerintah dan pemerintah (antar sektor pemerintahan).

## **II.2 PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**

Prediksi kondisi umum Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 merupakan rumusan umum dari output-output sektoral yang diperoleh melalui analisis terhadap kondisi umum daerah saat ini dan kondisi sebelumnya. Apabila arahan umum pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD ini dilaksanakan maka prediksi kondisi umum Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai produk dari pembangunan jangka panjang selama 20 tahun diikuti dengan pemerataan sehingga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pendapatan daerah regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 21.900.000,- atau meningkat enam kali lipat dibandingkan PDRB pada tahun 2003. Pendapatan mayoritas (lebih dari 95%) penduduk sudah berada di atas garis kemiskinan global yang berlaku pada tahun 2025, sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tidak lebih dari 5%.
2. Sumber daya manusia Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki kompetensi tinggi dalam memenuhi persyaratan dunia kerja (kompetensi kecerdasan dan atau keterampilan) atau dalam menciptakan lapangan kerja baru (kompetensi kewirausahaan). Sebagai implementasi wajib belajar 9 tahun, lulusan SLTP ke atas sudah memiliki orientasi yang jelas antara melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masuk ke dunia kerja. Peningkatan kompetensi di atas terjadi merata pada semua strata masyarakat seperti antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan. Tolok ukur peningkatan kompetensi SDM ditandai dengan rendahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong hingga di bawah 5%.
3. Kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 diimbangi dengan kondisi kehidupan bermasyarakat yang kondusif di bawah

payung penegakan hukum negara dan hukum adat secara maksimal, adil dan merata. Ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat terjamin dengan adanya sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Kualitas moral masyarakat sudah tinggi yang ditandai dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan dan terciptanya harmoni sosial dalam berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, kondisi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang sejahtera pada tahun 2025 tetap menerapkan nilai-nilai luhur daerah dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kemajuan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong juga diikuti dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan terpeliharanya produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan, terjaganya daerah-daerah tangkapan air sehingga berfungsi sebagai penuplai air bagi kawasan yang berada di bawahnya, dan berkembangnya kuantitas dan kualitas produk-produk pertanian dataran tinggi sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Pemanfaatan wilayah dan ruang dilakukan sesuai dengan daya dukungnya sehingga dapat tersedia dalam kurun waktu tidak terbatas tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya.
5. Kabupaten Rejang Lebong tidak lagi termasuk kategori daerah tertinggal sejak tahun 2010. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah ini sudah semakin meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ditandai dengan terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman dan lancar, tercukupinya ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang berfungsi sebagai penghubung Kabupaten Rejang Lebong dengan daerah-daerah lain, meningkat dan terpeliharanya jaringan irigasi dan drainase, dan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2025, minimal 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk perdesaan sudah mendapat pelayanan telpon, listrik dan air minum.
6. Akhirnya, semua kemajuan pembangunan yang dicapai Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diuraikan di atas diperoleh melalui sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Hal ini ditandai dengan terwujudnya kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah sehingga investasi masuk ke Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapat hambatan birokrasi. Kepercayaan tersebut muncul karena didukung oleh sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan daerah sebagaimana terlihat dalam penyusunan APBD. Roda pemerintahan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya masing-masing karena mereka ditempatkan berdasarkan prinsip *the right man on the right place*.

# **BAB**

## **III**

# **VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

---

### **III.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

Faktor pendorong utama pembangunan yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong adalah tingginya keanekaragaman sumber daya alam seperti lahan budidaya yang subur untuk pengembangan pertanian, iklim dataran tinggi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata dan komoditi pertanian dataran tinggi, dan potensi sumber daya air yang masih tinggi.

Faktor-faktor penghambat pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keanekaragaman keahlian penduduk dibandingkan rata-rata nasional, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita penduduk masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prosentase keluarga miskin (28%), dan terbatasnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.

### **III.2 VISI**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagaimana diuraikan di atas maka kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dapat dirumuskan ke dalam Visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006 – 2025 sebagai berikut:

**“Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan damai dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong”**

Pernyataan Visi di atas merupakan wujud dari keinginan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk maju dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah-daerah lain di Indonesia.

### **III.3 MISI**

Visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 2006 – 2026 memiliki tiga sasaran pembangunan utama, yakni masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang damai. Dengan demikian, Visi tersebut dijabarkan secara lebih operasional ke dalam beberapa Misi pembangunan guna menunjang ketiga sasaran Visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat maju dan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui optimalisasi sumber daya
3. Mewujudkan masyarakat yang damai, nilai-nilai luhur budaya lokal yang berkembang dan tata pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Masyarakat maju dan sumber daya manusia berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi, memahami pengertian dasar tentang agama yang dianut, serta sehat jasmani dan rohani.

Masyarakat sejahtera, menurut Bank Dunia tahun 2003, mempunyai penghasilan di atas standar garis kemiskinan global (US\$ 1 per kapita per hari), sementara menurut UNDP tahun 2003, standar kebutuhan minimal per hari untuk Indonesia adalah Rp. 12.500,- di kota dan Rp. 10.250,- di desa, baik melalui usaha mandiri maupun bekerja pada orang lain, ekonomi berbasis sumber daya, unit keuangan mikro, dan perluasan lapangan kerja.

Masyarakat damai berarti tidak ada konflik vertikal (pelayanan terhadap masyarakat) dan horizontal (kasus-kasus di masyarakat diselesaikan secara hukum adat) yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan memiliki indikator bebas dari polusi, tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan baik secara kuantitas maupun kualitas, dan tidak terjadi konflik pemanfaatan sumber daya alam di masyarakat.

Berdasarkan uraian Visi dan Misi di atas, serta guna menjadikan Visi dan Misi tersebut lebih operasional, maka disusun enam prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Rejang Lebong periode 2006 – 2025 sebagai berikut:

Prioritas 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prioritas 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas 3: Pengembangan infrastruktur.

Prioritas 4: Peningkatan pelayanan publik.

Prioritas 5: Pengembangan potensi PAD.

Prioritas 6: Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup berkelanjutan.

Keenam prioritas tersebut selanjutnya akan dijadikan landasan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006 – 2025.



### **III.4 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama dua puluh tahun ke depan harus disusun sedemikian rupa agar Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai pada tahun 2025 sedangkan indikasi keberhasilannya harus terlihat setiap periode lima tahun. Untuk menjamin terjadinya keterkaitan yang erat antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan, maka berikut ini akan diuraikan Arah Pembangunan jangka panjang berdasarkan pengelompokan Misi atau Agenda Pembangunan. Setiap agenda dijabarkan terlebih dahulu ke dalam beberapa prioritas kebijakan yang diikuti dengan arah pembangunan jangka panjang dari masing-masing prioritas kebijakan.

Sebelum dilakukan penjabaran arah pembangunan jangka panjang, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan target dan indikator keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai selama 20 tahun ke depan. Target dan indikator setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **A. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **A.1. AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS**

Dari enam prioritas pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka prioritas pembangunan yang termasuk dalam agenda ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (Prioritas 1). Selain prioritas tersebut, agenda ini perlu dilengkapi dengan beberapa kebijakan lain yang relevan seperti peningkatan kualitas moral dan keimanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

###### **A.1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

1. Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah karena jenjang pendidikan masyarakat berperan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan untuk meningkatkan rata-rata jenjang pendidikan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, pembangunan pendidikan harus mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya terus bertambah. Pelayanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat yang disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
2. Mutu pendidikan perlu ditingkatkan pada semua jenjang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kebijakan ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, dan perluasan kesempatan belajar. Program wajib belajar secara

gratis perlu dilakukan di tingkat sekolah dasar dan SLTP, sedangkan perluasan kesempatan belajar di tingkat SLTA dilakukan melalui pembukaan sekolah-sekolah baru dan unggulan.

3. Iklim kompetitif perlu dikembangkan di kalangan siswa. Kebijakan ini dapat diarahkan pada pengadaan lomba-lomba prestasi dan kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan, seperti Olimpiade Sains, debat dalam Bahasa Inggris dan sebagainya. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi juga perlu digalakkan dalam menciptakan iklim kompetitif yang sehat di bidang pendidikan.
4. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dapat ditekankan pada pendidikan anak dini usia (PADU) pada anak usia 0 – 6 tahun, pendidikan non-formal di luar sekolah pada anak usia 16 – 18 tahun, dan pendidikan tinggi pada anak usia di atas 18 tahun. Perlu diciptakan suasana yang kondusif agar peran masyarakat dalam pendidikan dapat berkembang dengan baik.
5. Kesehatan merupakan indikator berikutnya yang digunakan dalam menilai kualitas SDM. Dalam 20 tahun ke depan, perlu diwujudkan lingkungan sehat, perilaku sehat, dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan rumah yang sehat, pemantapan sistem pembiayaan kesehatan melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan, dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat misalnya melalui Posyandu, Polindes dan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.
6. Gizi masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan SDM berkualitas di Kabupaten Rejang Lebong. Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat perlu dilakukan melalui penerapan konsumsi gizi seimbang dengan konsumsi energi rata-rata 2.200 kkal per kapita per hari dan konsumsi protein 50 g per kapita per hari, dan penurunan prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah. Pemberian makanan pendamping dan pemberian vitamin kepada balita juga perlu dilakukan untuk meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat.
7. Obat-obatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembinaan farmasi dan rumah sakit, pembinaan industri obat tradisional, penyediaan obat-obat esensial generik, dan pengendalian penyaluran obat agar masyarakat terhindar dari penyalagunaan dan kesalahgunaan obat. Pengawasan perlu dilakukan dengan ketat terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya, sedangkan kemampuan badan pengawas perlu ditingkatkan melalui sistem akreditasi internasional.
8. Program keluarga berencana perlu ditingkatkan guna mengendalikan jumlah penduduk yang berkualitas dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyediaan data dan

informasi keluarga berencana berskala mikro, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada penduduk usia remaja, perluasan jaringan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin (klasifikasi keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I), dan pembinaan terhadap kelembagaan dan jaringan institusi masyarakat yang bergerak di bidang keluarga berencana.

### **A.1.2. Meningkatkan Kualitas Moral dan Keimanan Masyarakat**

9. Kualitas moral dan keimanan masyarakat merupakan kondisi ideal yang diinginkan dalam upaya mengimbangi kemajuan yang akan dicapai di bidang ekonomi. Apabila tidak diimbangi dengan moral dan keimanan yang baik maka kemajuan tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi generasi mendatang dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya untuk meningkatkan kualitas moral dan keimanan masyarakat dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pelaksanaan even-even keagamaan, meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, menggali dan mensosialisasikan nilai-nilai agama, dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai acuan dalam pembangunan.
10. Sarana dan prasarana keagamaan perlu dikembangkan selama 20 tahun ke depan. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu dibangun sedangkan fasilitas dan SDM pengelola KUA perlu ditingkatkan di setiap kecamatan. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Islamic Center, Taman Alqur'an dan kelompok-kelompok pengajian perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Kabupaten Rejang Lebong diharapkan memiliki Pondok Pesantren Modern yang bertaraf nasional.
11. Kerukunan umat beragama, baik inter agama maupun antar agama, perlu diwujudkan di Kabupaten Rejang Lebong. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi perangkat agama serta lembaga dan organisasi agama hingga ke tingkat desa/kelurahan. Nilai-nilai agama perlu dilindungi melalui penerbitan Peraturan Daerah untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui penyuluhan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nilai-nilai agama diharapkan menjadi pegangan hidup masyarakat Kabupaten Rejang Lebong agar upaya pewujudan SDM berkualitas dapat terlaksana.
12. Kehidupan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong hendaknya terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti prostitusi, narkoba, minuman keras dan perjudian. Upaya pembebasan tersebut dapat dicapai melalui pembuatan regulasi tentang pelarangan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan melaksanakan pembinaan terhadap pelakunya.
13. Nilai-nilai agama hendaknya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang berhubungan langsung dengan hajat orang banyak. Upaya ini dimaksudkan untuk membangun dan memantapkan jati diri dan karakter daerah yang bertumpu pada kombinasi antara nilai-nilai luhur

daerah – seperti religius, kebersamaan dan persatuan – dengan etos kerja yang tinggi. Penanaman nilai-nilai agama kepada masyarakat diharapkan dapat meredam berbagai gejolak yang muncul dalam masyarakat, serta menjadi landasan yang kokoh bagi usaha-usaha pembangunan di masa yang akan datang.

### **A.1.3. Melaksanakan Pembangunan Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan**

14. Dinamika penduduk dikendalikan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Pertumbuhan jumlah penduduk perlu dikontrol sedemikian rupa agar kualitas hidup masyarakat terjamin guna mendapatkan SDM yang berkualitas.
15. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pembukaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi penyediaan informasi bursa tenaga kerja sampai ke tingkat desa/kelurahan, dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka menyiapkan tenaga terampil.
16. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga di kalangan masyarakat, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional.
17. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna. Upaya ini perlu didukung oleh peraturan daerah tentang perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan sistem kesejahteraan sosial daerah (SKSD), dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
18. Sistem perlindungan dan jaminan sosial perlu dibangun dan dikembangkan guna memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat dan pelayanan sosial dasar. Pembangunan sistem perlindungan dan jaminan sosial perlu didukung oleh peraturan daerah dan pendanaan yang memadai, serta sistem pendataan yang mutakhir seperti pengembangan sistem nomor induk kependudukan yang memuat informasi tentang kesejahteraan sosial penduduk.
19. Pembangunan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial harus juga menjangkau kelompok masyarakat lanjut usia dan penyandang masalah sosial lainnya (anak terlantar, gelandangan dan penderita cacat). Sarana dan prasarana pendukung perlu disediakan seperti panti asuhan, panti jompo dan panti persinggahan. Pelatihan keterampilan perlu dilakukan agar kelompok masyarakat ini dapat hidup secara mandiri.
20. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, serta untuk meningkatkan

kualitas hidup dan peran perempuan, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak di berbagai bidang pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini ditandai dengan menurunnya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Perempuan perlu diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menduduki jabatan di bidang pemerintahan. Kelembagaan hukum dan pemerhati masalah perempuan dan anak perlu diperkuat hingga ke tingkat daerah termasuk penyediaan data statistik tentang gender dan anak.

## **A.2. AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA**

Agenda Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Pemanfaatan Sumber Daya didukung oleh tiga prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Rejang Lebong, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prioritas 2), pengembangan infrastruktur (Prioritas 3), dan pengembangan potensi pendapatan asli daerah (Prioritas 5). Selain itu, agenda ini juga didukung oleh beberapa kebijakan lain seperti melakukan revitalisasi pertanian, meningkatkan peranan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mengembangkan industri berbasis sumber daya, menanggulangi kemiskinan, dan kerjasama antar daerah.

### **A.2.1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

1. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemerataan pendapatan, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah memberdayakan perusahaan kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan peluang usaha yang seluas-luasnya dan menyederhanakan birokrasi yang terkait. Pola kemitraan perlu dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, UKM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka memperkuat ekonomi daerah.
2. Pengembangan perekonomian yang berorientasi global antar daerah yang sinergis dikoordinasikan dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Kegiatan peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja dilakukan secara terpadu untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan dan perlindungan kerja guna mempercepat penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

3. Industri, perdagangan dan investasi dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja. Selanjutnya dilakukan peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepentingan publik, termasuk infrastruktur, telekomunikasi, energi listrik dan air bersih serta kebutuhan dasar lainnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disehatkan melalui peningkatan disiplin anggaran, mengintensifkan penerimaan pajak secara progresif, adil, jujur, hemat, dan bertanggung jawab. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
5. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
6. Perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.
7. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah.
8. Pada tahun 2025, minimal 95% penduduk Kabupaten Rejang Lebong sudah tergolong pada klasifikasi keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah melalui pengembangan SDM potensial sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, peningkatan kualitas manajerial kelompok-kelompok kegiatan dalam masyarakat, peningkatan akses informasi, dana dan sarana bagi kelompok ekonomi produktif di semua wilayah, penumbuhkembangan jaringan kelompok ekonomi produktif, penggalangan sistem kemitraan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang relevan.
9. Kesejahteraan petani perlu diwujudkan dengan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dari garis kemiskinan global. Kebijakan ini diarahkan pada (i)

optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, (ii) peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil ikutan, dan (iii) optimalisasi pemasaran. Pembangunan pertanian ke depan perlu ditekankan pada komoditi yang memiliki prospek agribisnis dan agroindustri.

10. Kesejahteraan keluarga pekerja tambang perlu ditingkatkan sehingga pendapatan per kapita per hari berada di atas garis kemiskinan global. Target ini dapat dicapai melalui penegakan aturan penerapan upah minimum regional dan penerapan sistem kemitraan antara pekerja tambang dan pemilik tambang.
11. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berusaha di sektor perindustrian dan perdagangan diwujudkan sehingga pendapatan per kapita per hari berada di atas garis kemiskinan global. Target tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan manajemen di bidang perindustrian dan perdagangan, pengembangan peluang pasar, dan pembinaan kualitas produk yang diperdagangkan.

#### **A.2.2. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur**

12. Pembangunan infrastruktur terdiri dari bidang transportasi, irigasi, drainase di lingkungan permukiman, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur bidang transportasi difokuskan pada jaringan transportasi darat yang meliputi jalan lingkungan dan jalan usaha tani. Kegiatan strategis dalam pembangunan jalan lingkungan dan jalan usaha tani antara lain adalah pembangunan jalan baru, peningkatan jalan dan jembatan yang telah ada, pemeliharaan jalan secara rutin dan periodik, dan penambahan trotoar jalan di kawasan permukiman.
13. Pembangunan perhubungan dan transportasi diarahkan pada upaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan terkendali dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Jaringan transportasi perlu dikelola dengan baik melalui perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten, dan pembangunan serta pemeliharaan terminal, halte, tempat parkir dan tempat penyeberangan. Pelayanan perlu diberikan secara optimal kepada pengguna jasa transportasi dan angkutan jalan seperti analisis dampak lalu lintas, pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan, dan penetapan batas standar maksimum muatan dan berat kendaraan angkutan barang.
14. Pengembangan transportasi diarahkan pada keseimbangan penyediaan fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi yang ada harus saling mendukung untuk memungkinkan tercapainya sistem transportasi yang lancar, ekonomis dan tepat guna. Pengembangan sistem transportasi darat adalah dengan menambah ruas jalan arteri dan kolektor hingga masing-masingnya yang merupakan lintasan yang terus menerus dan berfungsi sebagai penghubung daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan daerah lainnya. Penambahan

dilakukan dengan meningkatkan jalan kolektor menjadi jalan arteri dan ruas jalan lokal menjadi jalan kolektor. Sedangkan untuk pengembangan sarana penunjang adalah dengan perluasan jaringan telepon dan listrik di kecamatan. Perluasan ini diarahkan ke kota-kota kecamatan yang memiliki aktifitas ekonomi yang cukup besar.

15. Pembangunan infrastruktur bidang irigasi diarahkan pada pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa di setiap desa/kelurahan dan kecamatan. Pemberdayaan petani dalam pemeliharaan irigasi perlu dilakukan melalui pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A).
16. Pembangunan saluran drainase perlu dilakukan di setiap permukiman penduduk di kota maupun di perdesaan. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi pembangunan saluran drainase primer, pembangunan saluran drainase terbuka atau tertutup, dan pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada.
17. Pembangunan kawasan permukiman diarahkan pada tersedianya lingkungan siap bangun dan kawasan siap bangun, serta tertatanya lingkungan komunitas permukiman. Perlu dilakukan perencanaan kawasan siap bangun dan penataan ulang lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. Sarana dan prasarana permukiman termasuk jalan, air bersih dan jaringan listrik perlu dipersiapkan ke dalam paket pembangunan kawasan permukiman. Perlu diupayakan pemberian bantuan dana bergulir kepada masyarakat untuk pembangunan kawasan permukiman.
18. Pemenuhan kebutuhan air minum perlu ditingkatkan hingga mencapai 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk perdesaan, baik secara kuantitas maupun kualitas dan kontinuitas. Target tersebut dicapai melalui optimalisasi kapasitas prasarana dan sarana air minum, pengurangan kebocoran air agar tidak lebih dari 2,5% per tahun, dan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat.
19. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pelayanan publik dilakukan agar sekitar 90% dari prasarana yang ada terpelihara dengan baik. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pelayanan publik terutama diarahkan pada gedung-gedung perkantoran, sekolah dan sarana-prasarana kesehatan.

### **A.2.3. Mengembangkan Potensi Pendapatan Asli Daerah**

20. Sektor pertanian secara umum (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan di Kabupaten Rejang Lebong. Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertanian diharapkan meningkat minimal 10% per tahun. Target tersebut dapat dicapai melalui peningkatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan optimalisasi retribusi hasil pertanian.
21. Pembangunan perhubungan dan transportasi diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui optimalisasi perizinan di bidang angkutan dalam



wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Target tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan izin trayek (angkutan kota dan pedesaan), izin angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang, izin operasi taksi dalam kota, izin usaha sewa kendaraan, fasilitasi parkir dan pengujian kendaraan bermotor.

22. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek-objek retribusi merupakan potensi PAD yang harus dioptimalkan. Program intensifikasi yang dapat dilakukan adalah mengintensifkan penarikan retribusi, sedangkan ekstensifikasi meliputi pengembangan objek-objek retribusi di berbagai bidang pembangunan. Bidang-bidang pembangunan yang memiliki objek-objek retribusi sebagai sumber PAD adalah bidang koperasi dan UKM, bidang energi dan sumber daya mineral, serta bidang perindustrian dan perdagangan.
23. Badan-badan usaha milik daerah (BUMD) perlu dioptimalkan dalam menghasilkan PAD bagi Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), misalnya, diharapkan meningkatkan PAD sebesar 10% per tahun melalui jasa pelayanan air minum. Perusahaan daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta melalui azas kerjasama yang saling menguntungkan semua pihak (perusahaan, swasta, masyarakat dan pemerintah daerah).
24. Potensi PAD lain yang dapat dikembangkan adalah jasa pengelolaan alat-alat berat, kepengurusan izin bangunan, dan usaha galian C. Target yang akan dicapai dari potensi ini adalah terwujudnya peningkatan PAD minimal 10% per tahun di bidang jasa pengelolaan alat berat, izin bangunan dan usaha galian C.

#### **A.2.4. Melakukan Revitalisasi Pertanian**

25. Pembangunan revitalisasi pertanian diarahkan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dalam rangka modernisasi perekonomian pedesaan. Sektor pertanian dalam arti luas dan sektor perindustrian menjadi basis aktivitas ekonomi. Apabila dikelola secara efisien dan sinergis, kedua sektor tersebut dapat menghasilkan komoditi yang berkualitas melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing. Agribisnis dan agroindustri menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Rejang Lebong, didukung oleh sektor jasa pariwisata yang perannya terus meningkat guna menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing.
26. Produktivitas di sektor pertanian ditingkatkan sehingga rasio antara kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan jumlah pekerja di sektor tersebut meningkat. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian primer hendaknya tidak lebih dari 30% sehingga tersedia cukup tenaga kerja di sektor industri dan jasa. Upaya meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan tenaga kerja minimal hanya dapat dicapai melalui penerapan sistem mekanisasi pertanian sebagai pengganti tenaga kerja manusia.

27. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian membutuhkan paket-paket teknologi pertanian spesifik lokasi, kelembagaan tani yang dinamis, sistem penyebaran informasi yang efektif, dan SDM penyuluh pertanian yang handal. Program-program unggulan yang dibutuhkan antara lain pelaksanaan kaji terap yang diikuti sosialisasi paket teknologi pertanian, peningkatan kualitas kepemimpinan dan lembaga petani, penerapan metode penyuluhan pembangunan terpadu dan partisipatif, dan peningkatan akses petani terhadap informasi teknologi dan pasar.
28. Target utama yang ingin dicapai melalui revitalisasi pertanian adalah terciptanya modernisasi perekonomian perdesaan. Pencapaian target tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian, baik aparatur maupun petani, peningkatan akses permodalan bagi petani, dan penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan. Kualitas SDM petani dapat ditingkatkan melalui optimalisasi lembaga-lembaga petani seperti kelompok tani dan kelompok usaha bersama (KUB) komoditas tertentu. Pembinaan dan rekrutmen pegawai negeri sipil baru perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM aparatur di bidang pertanian.
29. Masyarakat perdesaan terutama petani perlu diberi kemudahan akses terhadap permodalan. Perlu dikembangkan sistem kelembagaan ekonomi rakyat dengan sistem simpan pinjam dan perkreditan. Lembaga tersebut dapat mempertimbangkan kelayakan usaha dalam pengucuran kredit sehingga menguntungkan ke dua bela pihak (petani dan lembaga permodalan). Lembaga ekonomi rakyat seperti Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) yang diluncurkan Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dapat dikembangkan secara lebih luas.
30. Lembaga usaha ekonomi rakyat di perdesaan harus dibina secara intensif agar keberadaannya bermanfaat bagi petani. Bentuk-bentuk pembinaan tersebut meliputi pembinaan pemasaran dan kemitraan kerja, sosialisasi usaha ekonomi rakyat yang potensial di daerah binaan, pelatihan pola pemasaran hasil produksi dan pengembangan usaha industri kecil, dan pelatihan pengelolaan permodalan lembaga ekonomi rakyat.
31. Kelembagaan masyarakat dan kelembagaan sosial perdesaan yang mandiri perlu diwujudkan. Kelembagaan masyarakat yang mandiri dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga perencanaan dan lembaga ketahanan masyarakat perdesaan, pembinaan terhadap SDM dan sistem manajemen lembaga, dan fasilitasi dari pemerintah kabupaten. Kelembagaan sosial di perdesaan dapat berupa lembaga adat desa, lembaga keterampilan bagi anak dan remaja, dan lembaga PKK.

#### **A.2.5. Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)**

32. Peningkatan fungsi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten rejang Lebong ke depan perlu diwujudkan agar tumbuh menjadi usaha berkembang dan mandiri. Kebijakan ini diarahkan pada upaya meningkatkan SDM pengurus koperasi dan UKM menjadi wirausahawan yang profesional,

bermartabat dan bermoral, serta pada upaya mencari peluang pengembangan modal usaha koperasi dan UKM. Program-program yang dapat dilakukan antara lain adalah pelatihan, pendampingan usaha, penjalinan kemitraan antara koperasi/UKM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan fasilitasi promosi dagang untuk koperasi dan UKM.

33. Sumber daya manusia aparatur di bidang koperasi dan UKM perlu ditingkatkan melalui pembinaan koperasi dan UKM menuju usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kuantitas aparatur melalui rekrutmen tenaga baru yang berkualitas di bidang koperasi dan UKM, serta pada peningkatan kualitas aparatur yang telah ada melalui pendidikan dan pelatihan.
34. Koperasi dan UKM yang sehat perlu diwujudkan sehingga setiap tahun dihasilkan minimal 7 buah koperasi dan UKM yang sehat. Kriteria sehat perlu ditetapkan melalui sistem akreditasi terhadap koperasi dan UKM. Sistem *reward and punishment* perlu diterapkan terhadap koperasi dan UKM guna memacu kinerja pengelola usaha tersebut.

#### **A.2.6. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

35. Pembangunan IPTEK di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah di pasar bebas. Pembangunan IPTEK juga diarahkan agar pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong tetap berlandaskan pada azas kelestarian fungsi sumber daya dan lingkungan hidup.
36. Di bidang pertanian, pembangunan IPTEK diarahkan pada upaya penemuan, adaptasi dan pemanfaatan teknologi pertanian yang spesifik lokasi, baik pada skala kabupaten maupun pada skala kawasan di dalam wilayah kabupaten. Paket-paket teknologi spesifik lokasi terutama ditujukan pada aspek produksi yang sangat bergantung pada kondisi agroekosistem yang spesifik di Kabupaten Rejang Lebong.
37. Daya saing produk-produk pertanian di pasar regional, nasional dan internasional memerlukan jaminan mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku. Standarisasi produk-produk pertanian dapat dilakukan melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kualifikasi pasar seperti penerapan teknologi pertanian organik untuk mengurangi residu kimia dalam produk pertanian.
38. Pembangunan IPTEK juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengembangan ketiga komponen IPTEK tersebut harus dilakukan dalam konteks peningkatan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan.
39. Dukungan terhadap pembangunan IPTEK dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset, perumusan kebijakan riset yang

sesuai dengan kebutuhan pasar, dan peningkatan sinergisme lembaga-lembaga IPTEK yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan di Provinsi Bengkulu. Pembangunan IPTEK perlu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Kerjasama dengan lembaga-lembaga IPTEK nasional dan internasional perlu dikembangkan. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pembangunan IPTEK agar produk-produk riset dapat dikembangkan menjadi industri-industri yang berdaya saing tinggi.

40. Masyarakat desa perlu memperoleh akses yang seluas-luasnya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pendataan dan pembentukan kelompok masyarakat teknologi tepat guna di pedesaan, pelatihan tentang pemanfaatan, pemasaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pembinaan dan stimulasi kelompok masyarakat teknologi tepat guna, dan promosi hasil produk unggulan teknologi tepat guna pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

#### **A.2.7. Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)**

41. Sasaran dari pengembangan industri berbasis sumber daya adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas industri yang bermuara pada terciptanya sistem ekonomi biaya rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Industri dikembangkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat menekan biaya produksi. Upaya ini dapat menghasilkan sistem perekonomian daerah berdaya saing tinggi di era globalisasi.
42. Pembangunan industri berbasis sumber daya di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian terutama hortikultura sayuran sebagaimana tertuang dalam master plan pembangunan Agropolitan Kabupaten Rejang Lebong. Industri ini diharapkan memiliki berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.
43. Investasi di bidang industri menengah dan besar perlu diwujudkan guna memfasilitasi penerapan mekanisasi di bidang industri dan perdagangan. Upaya perwujudan investasi dapat dicapai melalui penyediaan data pasar yang akurat dan penyediaan informasi teknologi di bidang industri dan perdagangan. Data dan informasi tersebut harus dapat diakses oleh calon investor secara luas seperti melalui jaringan internet.

44. Pengembangan industri yang berbasis SDA diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk meningkatkan daya saing dalam merebut pasar global. Namun pemanfaatan SDA sebagai basis industri harus tetap memperhatikan aspek pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Masyarakat lokal harus tetap diberi akses terhadap pemanfaatan SDA di sekitarnya untuk pengembangan industri dalam rangka meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka.
45. Perlindungan konsumen perlu diwujudkan dalam pembangunan industri berbasis sumber daya. Upaya-upaya yang dapat ditempuh antara lain adalah pelaksanaan pengawasan kemetrolagian guna meningkatkan kesadaran konsumen akan hak sebagai konsumen dalam perdagangan, dan pembentukan badan perlindungan konsumen untuk mengembangkan komunikasi antara konsumen dan badan perlindungan konsumen.

#### **A.2.8. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan**

46. Sasaran dari kebijakan ini antara lain adalah berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong di tingkat Provinsi Bengkulu, regional (Pulau Sumatera) dan nasional. Perekonomian dikembangkan berlandaskan azas pertumbuhan dan pemerataan sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
47. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam konteks peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan perekonomian daerah. Pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai program strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan dan diversifikasi keahlian masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru dengan mengembangkan sektor industri berbasis sumber daya lokal dan sektor jasa, dan peningkatan keuangan daerah dengan menggali sumber-sumber PAD baru dan mengefektifkan sumber-sumber PAD yang telah ada.
48. Kabupaten Rejang Lebong ke depan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam waktu dua puluh tahun ke depan, indeks IPM Kabupaten Rejang Lebong harus berada posisi tiga besar di Provinsi Bengkulu dan sepuluh besar di Pulau Sumatera. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong harus dilakukan secara terpola sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan semua potensi yang tersedia. Langkah-langkah jangka panjang yang dapat diambil adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis, mengembangkan akses transportasi dan informasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pembangunan secara khusus di kawasan-kawasan terpencil dan tertinggal.

### **A.2.9. Kerjasama Antar Daerah**

49. Paradigma pembangunan ke depan tidak lagi melihat suatu daerah secara parsial, melainkan harus melihatnya sebagai bagian dari suatu kawasan regional yang lebih luas. Wilayah perbatasan dengan daerah lain tidak lagi dianggap sebagai barisan terbelakang dalam pembangunan, melainkan harus diperlakukan sebagai barisan terdepan dalam melakukan kerjasama antar daerah. Di bidang kependudukan, kerjasama antar daerah dapat mencakup perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat melalui program transmigrasi.
50. Pembangunan transmigrasi perlu direncanakan secara terpadu dan tepat sasaran. Rencana teknik pembangunan kawasan transmigrasi dalam jangka panjang perlu disediakan yang didukung oleh data dan informasi yang akurat. Calon transmigran yang akan ditempatkan di suatu kawasan harus mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang dan keterampilan yang dimiliki transmigran dengan potensi sumber daya yang akan dikembangkan di kawasan yang akan mereka tempati. Tenaga ahli dan profesional perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi.
51. Transmigrasi lokal perlu diprogramkan untuk menampung masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang membutuhkan lokasi pemukiman baru seperti perambah hutan lindung, penduduk daerah miskin dan korban bencana alam. Kebutuhan standar permukiman perlu dipersiapkan seperti sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), fasilitas umum untuk pendidikan, kesehatan dan keagamaan, serta kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman. Kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dan warga transmigrasi perlu diwujudkan melalui pembinaan dan penciptaan iklim bermasyarakat yang kondusif.
52. Kerjasama antar daerah kabupaten dan provinsi perlu diwujudkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong. Kerjasama ini harus difokuskan pada upaya pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Rejang Lebong seperti pertanian (terutama hortikultura sayuran) dan pariwisata. Outlet-outlet pemasaran perlu dibuka di daerah-daerah yang menjadi target pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Rejang Lebong.

### **A.3. AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DAMAI, NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA LOKAL YANG BERKEMBANG DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Prioritas yang termasuk dalam Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Nilai-nilai Luhur Budaya Lokal yang Berkembang dan Tata Pemerintahan yang Baik adalah Peningkatan pelayanan publik (Prioritas 4). Selain itu, kebijakan-kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan agenda ini adalah mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).

### **A.3.1. Meningkatkan Pelayanan Publik**

1. Prioritas ke-4 pembangunan jangka panjang Kabupaten Rejang Lebong adalah peningkatan pelayanan publik. Kebijakan ini diarahkan pada dua aspek pelayanan, yakni pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan dan kedamaian) dan pelayanan publik untuk kemajuan ekonomi masyarakat.
2. Pelayanan sosial ketentraman dan kesehatan masyarakat perlu digalakkan guna menjamin ketertiban umum masyarakat dan penanggulangan masalah sosial. Kebijakan ini diarahkan pada penegakan hukum bagi pelaku kegiatan yang meresahkan masyarakat (misalnya pemasok, pengedar dan pemakai narkoba), dan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial kesehatan masyarakat tidak mampu (seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing).
3. Kabupaten Rejang Lebong diharapkan menjadi daerah yang paling bersih, indah dan sehat di Provinsi Bengkulu. Sarana dan prasarana kebersihan perlu disediakan di perkotaan dan perdesaan, seperti sarana pengelolaan dan pengolahan sampah dan tinja yang ramah lingkungan, sehingga jasa pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Sampah dan tinja dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk organik dan bio gas. Keindahan kota dan kecamatan ditata dengan menyediakan sarana dan prasarana taman, ruang terbuka hijau dan lampu hias.
4. Kesatuan dan persatuan antar masyarakat harus dipertahankan di Kabupaten Rejang Lebong. Undang-undang politik perlu disosialisasikan secara rutin terutama kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik. Wawasan kebangsaan masyarakat ditingkatkan melalui penataran secara rutin. Kualitas sumber daya aparatur di bidang perlindungan masyarakat ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan.
5. Pelayanan di bidang kependudukan perlu ditingkatkan guna mendapatkan sistem administrasi dan informasi kependudukan yang efektif dan efisien. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Peningkatan pelayanan tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana pelaksanaan administrasi kependudukan dan SDM aparatur berkualitas di bidang kependudukan. Pendataan kependudukan harus dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT).
6. Selain berhak mendapatkan pelayanan yang prima, masyarakat juga dituntut memiliki kesadaran hukum dan ketertiban hukum. Penegakan hukum dan tata tertib (peraturan daerah) perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif. Keseimbangan antara pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan kesadaran dan ketertiban hukum yang diberikan masyarakat akan menciptakan kondisi Kabupaten Rejang Lebong yang aman dan damai.

### **A.3.2. Mengembangkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal**

7. Penerapan hukum adat Rejang Lebong di Kabupaten Rejang Lebong perlu diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kebijakan ini diarahkan pada pembuatan Peraturan Daerah tentang hukum adat, publikasi yang berhubungan dengan upaya pelestarian hukum adat, pelatihan tentang penerapan hukum adat, dan perwujudan kelembagaan Badan Musyawarah Adat (BMA) yang independen. Perangkat adat perlu dibina secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
8. Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong hendaknya dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai aset wisata yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi yang kondusif perlu diciptakan seperti penyediaan sarana dan prasarana wisata dan kebudayaan, penciptaan lingkungan yang sehat dan aman, penyediaan sanggar-sanggar kebudayaan, dan revitalisasi Balai Adat. Pusat informasi wisata dan kebudayaan perlu disediakan secara lengkap, seperti Media Center Wisata dan Kebudayaan, promosi objek wisata dan seni budaya melalui media elektronik, pengumpulan data dan informasi kebudayaan daerah, dan mempermudah perizinan pengelolaan wisata dan biro perjalanan.
9. Pengkajian dan penelitian nilai-nilai budaya daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menggali dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal di Kabupaten Rejang Lebong. Aset-aset budaya yang berhasil diteliti, seperti kesenian daerah, bangunan bersejarah dan cagar budaya, perlu dipelihara dan dilestarikan sehingga dapat menjadi warisan kepada generasi mendatang. Eksibisi kebudayaan daerah seperti pagelaran seni perlu dipertunjukkan secara rutin pada even-even tertentu.

### **A.3.3. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

10. Kemajuan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan riil dari pemerintah. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
11. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di berbagai daerah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi.



12. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri perlu dioptimalkan. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
13. Pada tahun 2025, sekitar 90% desa/kelurahan sudah mandiri dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan 85% sistem administrasi dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan sudah berjalan efektif dan efisien. Target di atas dapat dicapai melalui penciptaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang handal dan profesional yang didukung oleh sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik. Program-program strategis yang dapat dilakukan adalah pelatihan manajemen pemerintahan desa/kelurahan dan pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan secara rutin.
14. Sarana dan prasarana penunjang kelembagaan pemerintahan perlu ditingkatkan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa dan kelurahan. Kesejahteraan aparatur pemerintahan, terutama di tingkat desa dan kelurahan, ditingkatkan guna mendapatkan kinerja aparatur yang optimal, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek penyalagunaan wewenang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **A.4. AGENDA MEWUJUDKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Prioritas ke-6 pembangunan Kabupaten Rejang Lebong jangka panjang adalah Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup berkelanjutan. Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan dua komponen ekosistem yang sangat unik dibandingkan di daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan karena kondisi geografisnya yang spesifik, yakni didominasi oleh kawasan konservasi dengan rentang ketinggian hingga lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Upaya untuk mewujudkan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan berikut: (a) pemanfaatan SDA pertanian secara berkelanjutan, (b) pembangunan kehutanan dan konservasi sumber daya air, (c) pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan, (d) pengendalian SDA dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya, dan (e) penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan. Sasaran akhir dari kebijakan-kebijakan di atas adalah terwujudnya pola pemanfaatan SDA dan lingkungan secara terus menerus tanpa terjadinya degradasi yang dapat menurunkan nilai-nilai ekonomi dan non-ekonomi yang dimiliki sumber daya tersebut.

#### **A.4.1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**

1. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sedemikian rupa agar diperoleh manfaat secara ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sumber daya alam hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga keberlanjutannya dapat terjamin.
2. Kelompok SDA terbarukan, seperti sumber daya pertanian dan kehutanan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal dan efisien. Sebagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan SDA terbarukan harus diinvestasikan kembali bagi menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan sumber daya tersebut bagi generasi yang akan datang.
3. Lahan merupakan komponen sumber daya pertanian yang paling rentan terhadap proses degradasi. Pemanfaatan sumber daya lahan secara berkelanjutan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lahan sebagai media tumbuh tanaman, media penyimpan air, kawasan permukiman, dan media deposit bagi bahan-bahan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pengelolaan sumber daya lahan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daya dukungnya sehingga produktivitasnya tetap terjaga.
4. Kelompok SDA tidak terbarukan seperti tambang dan sumber daya mineral harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Data yang terukur dan akurat tentang potensi tambang dan sumber daya mineral perlu disediakan melalui penelitian yang intensif. Pelaksanaan operasional pertambangan harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitar tambang, baik lingkungan fisik maupun sosial. Kawasan pertambangan harus terkendali sesuai dengan standar baku mutu lingkungan melalui pengawasan areal pertambangan secara kontinu, penerapan analisis dampak lingkungan pada kawasan pertambangan dan rehabilitasi kawasan pertambangan yang telah rusak.
5. Masyarakat perdesaan perlu mendapat pembinaan dalam memanfaatkan SDA di perdesaan secara berkelanjutan. Program-program strategis yang dilakukan antara lain adalah pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA di perdesaan, pendataan potensi SDA, pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan SDA, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam pengelolaan SDA di perdesaan.

#### **A.4.2. Pembangunan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air**

6. Pembangunan kehutanan diarahkan agar sumber daya hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dikelola sedemikian rupa agar tetap memiliki fungsi-fungsi hidrologis, sebagai pencegah erosi dan sedimentasi,

sebagai sumber keanekaragaman hayati, dan sebagai pengatur iklim secara global. Pemanfaatan kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi-fungsi tersebut.

7. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan memperhatikan kaidah hutan sebagai komponen SDA terbarukan. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya hutan harus mengacu pada azas ekonomi, efisiensi dan keberlanjutan. Proses alih fungsi lahan pasca produksi harus disesuaikan dengan status kawasan tersebut, seperti dikembalikan sebagai kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi tetap, atau menjadi kawasan non-hutan untuk pemanfaatan kawasan hutan produksi lainnya.
8. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air diarahkan untuk menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dan meningkatkan keberadaan air tanah. Daerah tangkapan air harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga mampu menjadi penampung air di musim hujan dan sekaligus sebagai pensuplai air di musim kemarau. Sasaran dari pelestarian daerah tangkapan air adalah agar debit air permukaan (sungai dan danau) dapat dipertahankan pada kondisi yang relatif stabil. Objek pelestarian sumber daya air meliputi air tanah dangkal (*soil water*) dan air tanah dalam (*groundwater*).
9. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air tanah perlu diwujudkan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pasokan air. Kapasitas dan kualitas pasokan air dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelestarian kawasan hijau dan pembuatan daerah resapan di kawasan permukiman sehingga proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah menjadi efektif. Ke dua adalah pendekatan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air oleh masyarakat. Pendekatan ini perlu didukung oleh peraturan daerah yang mengatur sistem pemanfaatan air tanah oleh masyarakat dan industri di Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kelembagaan sumber daya air perlu diperkokoh guna meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM yang ada dalam lembaga pengelola sumber daya air. Jaminan kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

#### **A.4.3. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Secara Berkelanjutan**

11. Sumber daya mineral dan pertambangan merupakan jenis SDA yang tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sehemat mungkin. Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya dengan nilai tambah yang lebih besar.

12. Investasi di bidang pertambangan perlu diwujudkan melalui pemberian kemudahan investasi dan promosi potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral. Potensi bahan galian, energi dan sumber daya mineral perlu dipromosikan dan disosialisasikan kepada calon investor. Regulasi perlu dibuat sedemikian rupa agar dapat memberikan kemudahan investasi tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
13. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menginvestasikannya pada sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas tinggi. Investasi diarahkan sedemikian rupa agar pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat, terutama di sekitar lokasi pertambangan, meningkat dibandingkan sebelum dilakukan eksploitasi sumber daya mineral dan pertambangan.
14. Sebagian hasil dan pendapatan dari sumber daya mineral dan pertambangan harus digunakan untuk kegiatan reklamasi dan konservasi terutama terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan kedua kelompok SDA tersebut. Alih fungsi lahan setelah eksplorasi dan reklamasi perlu direncanakan secara matang agar produktivitas lahan secara ekonomi minimal sama dengan ketika kegiatan pertambangan masih berlangsung.
15. Sebagian hasil dan pendapatan dari pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan juga harus digunakan untuk pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan seperti biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut dan tenaga angin. Dengan demikian, upaya pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan dapat dilakukan melalui upaya penganekaragaman sumber energi dan konservasi energi dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup.

#### **A.4.4. Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Daya Dukungnya**

16. Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang di Kabupaten Rejang Lebong sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia. Daerah-daerah yang terletak di kawasan konservasi (seperti di kawasan daerah aliran sungai Musi) perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan yang berwawasan konservasi SDA dan lingkungan. Kebijakan ini perlu diambil agar daerah-daerah tersebut tidak hanya dibebani untuk melestarikan SDA dan lingkungan, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.
17. Pengendalian dampak lingkungan hidup diarahkan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup yang mencapai standar baku mutu lingkungan, dan pencapaian peningkatan SDM di bidang lingkungan. Target yang ingin dicapai melalui kebijakan ini adalah terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, tercapainya pemanfaatan SDA secara terkendali, meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

mengelola SDA dan lingkungan hidup, dan terbentuknya organisasi masyarakat yang berorientasi lingkungan.

18. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dikendalikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan di segala bidang. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengacu pada prinsip pemanfaatan SDA dan jasa yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi lingkungan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Bencana alam perlu diantisipasi mengingat Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya terletak pada kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam. Satuan Tugas (SATGAS) penanggulangan bencana alam perlu dikembangkan hingga mencapai 10 orang per desa/kelurahan. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam serta sumber daya manusianya perlu disediakan secara optimal. Perlu disiapkan SDM terlatih dan profesional dalam menanggulangi bencana alam seperti gempa, banjir, longsor dan bahaya kebakaran.

#### **A.4.5. Penegakan Hukum Bagi Keselamatan SDA dan Lingkungan**

20. Penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan diarahkan pada terciptanya jaminan penegakan hukum bagi kelestarian SDA dan lingkungan sehingga tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Pengendalian sumber daya hutan, misalnya, dapat dicapai melalui pendelegasian tugas penjagaan kehutanan kepada masyarakat setempat, dan pemindahan perambah hutan ke lokasi permukiman lain. Masyarakat perlu difasilitasi agar dapat merumuskan sendiri pola penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan di sekitar mereka.
21. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan perlu ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta generasi yang peduli terhadap isu-isu SDA dan lingkungan. Keunikan SDA dan lingkungan yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong, seperti keanekaragaman hayati dan daerah-daerah tangkapan air, hendaknya dijadikan laboratorium lapangan bagi generasi muda sehingga mereka dapat memahami akan pentingnya pelestarian SDA dan lingkungan. Pengetahuan tentang SDA dan lingkungan perlu disampaikan kepada generasi muda melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui kurikulum muatan lokal. Generasi muda yang sadar lingkungan diharapkan dapat menjadi penggerak utama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.
22. Wilayah dan tata ruang di Kabupaten Rejang Lebong harus dijadikan landasan utama dalam pengelolaan SDA dan lingkungan. Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan harus diatur agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

23. Kepastian hukum hak-hak atas tanah harus dijamin di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sengketa hak atas tanah tidak boleh terjadi dalam masyarakat, baik antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan swasta. Upaya tersebut dapat dicapai melalui penertiban administrasi pertanahan dengan menggunakan sistem informasi pertanahan secara digital.

## **B. PERAN SUB-WILAYAH PEMBANGUNAN**

1. Dalam paradigma baru, pembangunan tidak lagi dilakukan berdasarkan kebijakan sektor per sektor, melainkan berdasarkan kebijakan kawasan yang melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Penetapan sub-wilayah pembangunan dilakukan melalui penilaian terhadap keseragaman potensi sumber daya dari beberapa kawasan yang berdekatan satu sama lain, sehingga gabungan potensi tersebut dapat dikembangkan pada skala wilayah yang lebih luas. Guna memudahkan implementasi, pembagian sub-wilayah dilakukan berdasarkan batasan administrasi kecamatan.
2. Sub-wilayah Kecamatan Curup dan Bermani Ulu dapat dikembangkan menjadi sentra pertanian irigasi dan perikanan darat. Masyarakat di kedua kecamatan tersebut telah menguasai teknologi budidaya kedua komoditi tersebut sehingga pembinaan oleh pemerintah daerah dapat diarahkan pada aspek penanganan pasca panen dan pemasaran.
3. Sub-wilayah Kecamatan Selupu Rejang dan Sindang Kelingi dapat dikembangkan sebagai sentra sayur-sayuran dan buah-buahan dataran tinggi. Titik berat pembangunan jangka panjang di sub-wilayah ini adalah pada aspek industri pengolahan hasil dan pemasaran dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditi di tingkat petani.
4. Sub-wilayah Padang Ulak Tanding dan Kota Padang direkomendasikan untuk pengembangan perkebunan, terutama karet dan kakao. Pembangunan di sub-wilayah ini dimulai dari aspek budidaya, penanganan pasca panen dan pemasaran.

## **BAB IV      PENUTUP**

---

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Dokumen RPJPD Kabupaten Rejang Lebong ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/D) Kabupaten Rejang Lebong lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan damai dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong”, perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.